



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG

Jl. Jend. A. Yani No. 03 Tanjungpandan Belitung Telp. 0719 21288

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung (*PD DPPKBPM Kabupaten Belitung*) Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2022 ini merupakan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (*OPD*) yang menjadi tolak ukur pertanggungjawaban suatu instansi dalam upaya mencapai tujuan serta kemajuan dalam menjalankan misi organisasi.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, namun demikian dengan hasil yang belum maksimal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup dari Laporan Kinerja ini.

Tanjungpandan, Januari 2023
Kepala DPPKBPM



SALMAN ALFARISI, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 197809151996121001

DAFTAR ISI

		Hal.
	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Penjelasan Umum Organisasi	1
	1.3 Isu-Isu Strategis	7
	1.4 Dasar Hukum	8
	1.5 Sistematika Penyajian Laporan	9
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
	2.1 Gambaran Umum Kab. Belitung	10
	2.2 Perencanaan Strategis	11
	2.2.1 Visi Misi	11
	2.2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	12
	2.2.3 Indikator Kinerja Utama	14
	2.2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	19
	3.1 Capaian Kinerja PD Pada Tahun 2022	20
	3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu	22
	3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan RPJMD yang terdapat dalam Dokumen Renstra	22
	3.4 Review atas Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023	23
	3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja	26
	3.6 Kinerja Lainnya Tahun 2022	65
	3.7 Inovasi	67
	3.8 Akuntabilitas Keuangan	69
	3.9 Analisa Efisiensi	73
BAB IV	PENUTUP	75
	4.1 Keberhasilan dan Kegagalan	75
	4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja	76
	4.3 Strategi Pemecahan Masalah	76
	LAMPIRAN	77

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2022 merupakan tahun ke empat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Pemerintah Kabupaten Belitung akan berupaya keras menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan yang baik memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Penyusunan Laporan Kinerja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2022 adalah dalam rangka mengukur Kinerja OPD yang telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Laporan Kinerja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, merupakan indikator kinerja yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Dari analisis 2 (dua) tujuan yaitu: **Tujuan (1):** Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang, **Tujuan (2):** Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan 2 (dua) sasaran yaitu: **Sasaran (1):** Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana, **Sasaran (2):** Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 telah ditetapkan empat sasaran strategis yang harus dicapai oleh PD DPPKBPM Kabupaten Belitung. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan prosentase capaian kinerja berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) - Total Fertility Rate (TFR)	2,70% 2,22	1,23% 2,08	219,51% 106,73%	Sangat Baik Sangat Baik
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	- Meningkatnya persentase PUS ber KB - Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	0,50% 12,67%	0,40% 14,40%	80,00% 113,65%	Baik Sangat Baik
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa dengan IDM Desa Maju	31 Desa	37 Desa (28 Desa Maju dan 9 Desa Mandiri)	119,35%	Sangat Baik
4	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	12	27,58	233%	Sangat Baik

Selain enam Indikator Kinerja Utama tersebut, juga terdapat satu indikator kinerja sasaran penunjang yang ada dalam dokumen Renstra PD DPPKBPM Kabupaten

Belitung, namun tidak menjadi bagian dari dokumen IKU Perangkat Daerah. Indikator kinerja ini adalah indikator kinerja penunjang urusan pemerintah yaitu indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang merupakan indikator dari sasaran penunjang dari Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan nilai capaian kinerja pada tahun 2022 berada pada skala **3,57** dari target nilai capaian kinerja yang ditetapkan pada skala **3,28**

Pencapaian kinerja saat ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja Tahun 2022 ini juga merupakan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan untuk penyempurnaan berbagai kebijakan di bidang keuangan daerah.

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022, total pagu anggaran DPPKBPMMD Kabupaten Belitung adalah sebesar **Rp. 11.004.683.700** dengan total realisasi sebesar **Rp. 9.882.932.598** atau sebesar **89,81%** dari total pagu anggaran tahun 2022.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dipimpinnya kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah mengatur tatacara tentang bagaimana instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Sedangkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi, yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan tata kepengintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung (DPPKBPMK Kabupaten Belitung) menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021.

Laporan Kinerja PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung Tahun 2022 merupakan hasil evaluasi kinerja PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung selama 1 (satu) tahun yang diperlukan sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan bidang pengendalian penduduk Keluarga Berencana dan pemberdayaan masyarakat dan desa pada waktu yang akan datang.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung nomor 59 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung memiliki kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kedudukan

PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Belitung melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah.

c. Fungsi

PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung dalam menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan dan memfasilitasi peran serta lembaga masyarakat (LSM, Kelompok profesi, organisasi sosial politik, organisasi keagamaan) dan mendampingi pemerintah dalam melakukan penyusunan kebijakan daerah pada PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung antara lain:

- I. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan
 - a. Keserasian, Kesetaraan dan Keseimbangan Kebijakan Kependudukan
 - b. Keseimbangan Penduduk melalui Keluarga Kecil Sejahtera
 - c. Membangun Kemandirian Ber KB Masyarakat
 - d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - e. Peningkatan Kesadaran Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan
 - f. Peningkatan Ketahanan Keluarga
 - g. Peningkatan Akses Tingkat Kesejahteraan Keluarga
- II. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - a. Keluarga Berencana.
 - b. Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - c. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
 - d. Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembangan Anak.
 - e. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
 - f. Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu
- III. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
 - b. Peningkatan Peran Masyarakat di Pedesaan
 - c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - d. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 - e. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - f. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa

d. Struktur Organisasi

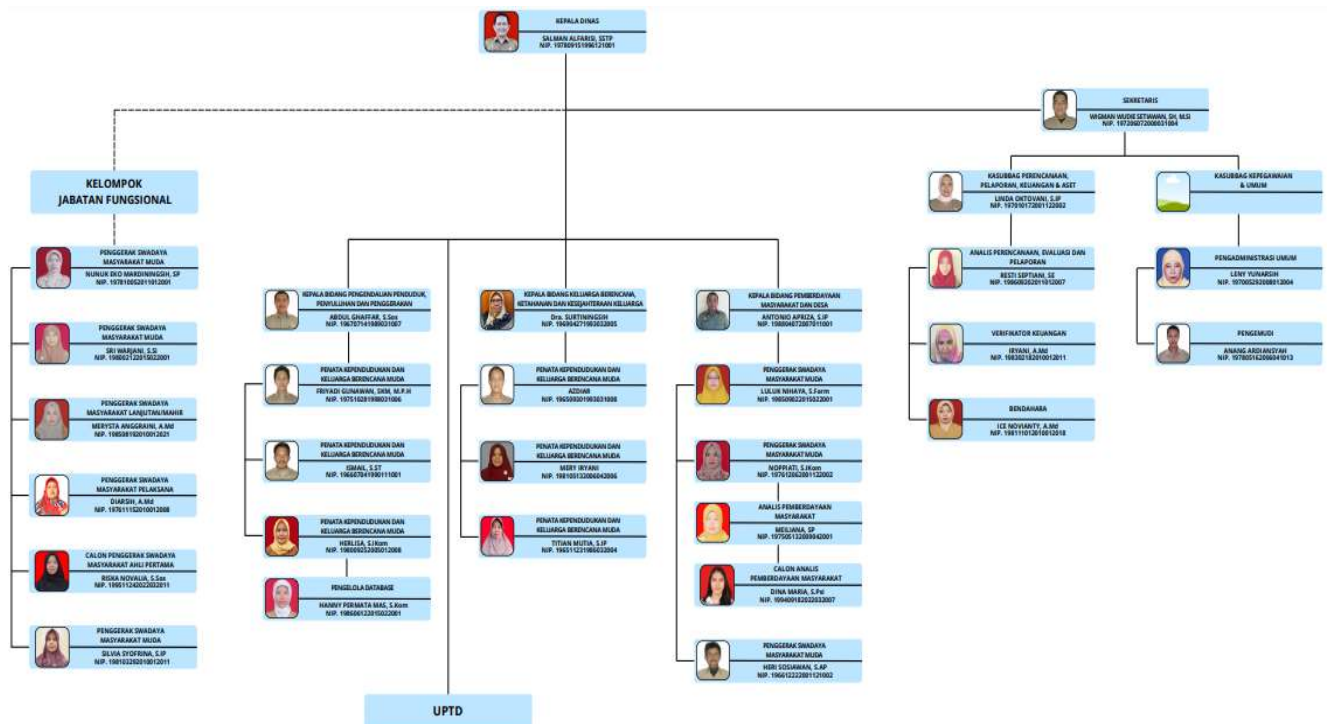
Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung mempunyai sumber daya Manusia sebanyak 29 orang terdiri dari 24 ASN dan 5 orang Tenaga Honorer yang mempunyai latar belakang pendidikan S2, S1,D3, dan SMA dan sumber daya berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas berupa gedung dan Peralatan kantor serta perlengkapannya.

Uraian struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - 2.1 Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset
 - 2.2 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
 - 3.1 Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan
 - 3.2 Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana
 - 3.3 Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas
 - 4.1 Sub Koordinator Jaminan Ber-KB
 - 4.2 Sub Koordinator Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - 4.3 Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa terdiri atas :
 - 5.1 Sub Koordinator Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat
 - 5.2 Sub Koordinator Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
 - 5.3 Sub Koordinator Pemerintahan Desa
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung dapat dilihat melalui bagan struktur organisasi di halaman berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI PD DPPKBPM KABUPATEN BELITUNG



Gambar 1.1. Struktur Organisasi DPPKBPM Kabupaten Belitung Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung nomor 59 tahun 2021

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis pada semua unsur di lingkungan PD DPPKBPM Kabupaten Belitung. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan urusan Aparatur Sipil Negara;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas PD DPPKBPM Kabupaten Belitung dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya.

- b. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah.
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberi atasan.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan tugas PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung dalam perumusan kebijakan teknis bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya.
- b. Perumusan kebijakan teknis daerah Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- e. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi daerah.
- f. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana
- g. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah bidang pembinaan ketahanan remaja.
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang bina keluarga lansia dan rentan.
- i. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga,
- j. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB daerah.
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- l. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- m. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan tugasnya.
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan sebagian tugas PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan program bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjalankan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya.
- b. Perumusan pelaksanaan fasilitasi swadaya gotong royong masyarakat.
- a. Pelaksanaan pemilihan dan pelantikan kepala desa serentak dan pemberhentian Kepala Desa.
- c. Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian badan permusyawaratan desa.
- d. Fasilitasi kerja sama desa dan penyelesaian perselisihan desa dan batas desa.
- e. Pelaksanaan pembinaan kepala desa dan Badan permusyawaratan desa.
- f. Pelaksanaan pembinaan aparatur desa.
- g. Pelaksanaan fasilitasi bantuan kepada masyarakat.
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- i. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan masyarakat dan desa.
- j. Pelaksanaan pengembangan desa/kelurahan.
- k. Pembinaan administrasi pemerintahan desa.
- l. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Jabatan Fungsional

- a. Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- b. Jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- c. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Pembinaan administratif jabatan fungsional, diselenggarakan oleh sekretaris dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- g. Pembinaan teknis Jabatan fungsional diselenggarakan oleh kepala bidang terkait meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

1.3 ISU ISU STRATEGIS

Salah satu dasar penyusunan Renstra PD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Dalam penentuan isi-isu strategis telah dilakukan pemetaan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa. Melakukan pemetaan dan telaahan atas hasil kegiatan dan diskusi serta rapat pembahasan penyiapan renstra. Berdasarkan Focussed Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan oleh Bappeda bersama PD terkait. Berdasarkan hasilnya dapat disimpulkan isu-isu yang terkait dengan urusan.

Adapun rumusan isu-isu strategis pada PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Kendati pelayanan dan sosialisasi keluarga berencana berhasil menjangkau seluruh wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Belitung. Hal ini terlihat adanya peningkatan partisipasi peserta KB setiap tahunnya. Namun demikian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung lebih Rendah jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk tingkat nasional yaitu 1,49%. Sementara sasaran pembangunan bidang kependudukan dan KB adalah menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) menjadi 1,26% tahun.

Pada prinsipnya perempuan dan laki-laki mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi dan pelaksanaan KB ini. Namun masih terlihat adanya kesenjangan dalam partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan KB dimana masih rendahnya tingkat keikutsertaan pria dalam ber KB yaitu 1,34%, jika di bandingkan dengan tingkat keikutsertaan wanita dalam ber KB. Rendahnya persentase partisipasi pria dalam kegiatan KB disebabkan (1) sosialisasi dan pembinaan tentang KB lebih banyak terhadap perempuan, (2) pandangan umum tentang KB lebih banyak ditujukan terhadap perempuan dari pada kepada laki-laki, (3) keterbatasan pilihan alat kontrasepsi untuk laki-laki, dan (4) kurangnya pembinaan dan kontrol terhadap laki-laki memutuskan partisipasi ber KB.

Selain hal di atas yang mempengaruhi isu keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga adalah:

- Tingginya angka pernikahan pada usia remaja sehingga meningkatnya perkawinan di usia muda meningkatnya angka AKI dan AKB.
- Tingginya angka perceraian yang diakibatkan faktor ekonomi menyebabkan lemahnya ketahanan keluarga
- Meningkatnya stunting dan kesulitan meningkatkan IPM
- Rendahnya Pencapaian Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif
- Terhambatnya pelaksanaan Pembinaan Pembangunan Kampung KB
- Rendahnya pencapaian Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif
- Rendahnya pencapaian MKJP
- Tingginya angka ASFR
- Penguatan Kelembagaan program KKBPK, Advokasi dan KIE belum maksimal

Atas isu-isu yang berkaitan dengan masalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini maka PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung perlu melakukan reformasi kebijakan dan rencana aksi bersama dengan BKKBN Prov Kepulauan Bangka Belitung untuk membentuk keluarga berkualitas sejahtera dan bahagia di Kabupaten Belitung ini.

2. Pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan penguatan kelembagaan desa melalui pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Hal-hal yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:
 - Masih rendahnya kualitas dokumen pelaporan pertanggungjawaban APBDesa
 - Perkembangan desa yang masih rendah
 - Jumlah dan mutu lembaga ekonomi desa masih rendah sehingga mempengaruhi PADes.
 - Fungsi Lembaga kemasyarakatan masih rendah
 - Peningkatan ekonomi desa dan kawasan pedesaan yang belum optimal.
 - Belum optimalnya pemanfaatan potensi desa.

1.4. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Laporan Kinerja PD DPPKBPMMD Kab. Belitung Tahun 2022 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
- l. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);

- m. Peraturan Bupati Belitung nomor 34 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- n. Peraturan Bupati Belitung nomor 59 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan sistematika mendasar pada Anak Lampiran II/1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

1. Kondisi Geografis Daerah.

Kabupaten Belitung dengan luas wilayah daratan dan lautan sebesar 8.656,69 km², terdiri dari luas wilayah daratan 2.293,69 km² dan luas wilayah lautan 6.363 km². Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107° 08' BT sampai 107°58' BT dan 02° 30' LS samapai 03° 15' LS yang terdiri dari 5 Kecamatan:

- Kecamatan Membalong : 909,550 Km²
- Kecamatan Tanjungpandan. : 378,450 Km²
- Kecamatan Badau. : 458,200 Km²
- Kecamatan Sijuk. : 413,992 Km²
- Kecamatan Selat Nasik. : 133,500 Km²

Pada peta dunia Pulau Belitung dikenal dengan nama *Bilitonit* yang bergaris tengah Timur- Barat kurang lebih 79 Km dan garis tengah Utara-Selatan kurang lebih 77 Km dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga merupakan wilayah Kepulauan yang terdiri dari 98 buah pulau besar dan kecil yang tersebar pada bagian sebelah barat Pulau Belitung. Pulau terbesar adalah Pulau Belitung dan masih ada pulau besar lainnya seperti Pulau Seliu, Pulau Mendanau dan Pulau Nadu. Dan daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mencapai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam.

2. Gambaran umum Demografis.

Berdasarkan hasil Pendataan Penduduk dari Instansi berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Belitung) pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Belitung berjumlah **186.331** jiwa dengan rincian per Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
**Data Demografi Kabupaten Belitung
Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Luas Daerah (km ²)	Penduduk (jiwa)		Jumlah
				Laki-Laki	Perempuan	
1	Tanjungpandan	16	378.448	53.269	52.199	105.468
2	Membalong	12	909.550	14.190	13.270	27.460
3	Badau	7	458.200	8.111	7.411	15.522
4	Sijuk	10	413.992	16.485	15.589	32.074
5	Selat Nasik	4	133.500	2.999	2.808	5.807
Jumlah		49	2.293.690	95.054	91.277	186.331

Pengelolaan sumberdaya manusia yang dimiliki daerah dan berorientasi kepada kompetensi akan menciptakan potensi sumberdaya yang lebih besar bagi pembangunan daerah ke depan dengan tujuan akhir kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2 PERENCANAAN STRATEGIS

2.2.1 Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Belitung serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka visi Kabupaten Belitung 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung adalah:

“Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023”

Adapun makna yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut adalah:

Ekonomi Berkeadilan bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Belitung harus dapat dialokasikan dan didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat serta memperluas kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses seluruh sumber daya;

Berdaya saing bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung sanggup berkompetisi dengan daerah lain, memiliki keunggulan dan mempunyai nilai tambah di tingkat nasional maupun internasional;

Inovatif mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung harus memiliki pembaharuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Sebagai penjabaran visi Kabupaten Belitung di atas disusunlah misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana cara melakukannya. Secara ringkas, dengan mempertimbangkan aspek relevan lainnya, seperti tugas pokok dan fungsi pemerintahan, serta karakteristik kelembagaan yang melekat pada lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Belitung, telah ditetapkan tiga misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

berikut :

Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Belitung yang meliputi hak untuk menikmati kesehatan, pendidikan, air bersih dan energi listrik, termasuk terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga yang kuat, bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan

minimal (SPM). Selain itu perlu ada upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, termasuk memperluas kesempatan kerja.

Misi Kedua Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, bermakna bahwa untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi. Pelayanan birokrasi yang optimal juga dicapai melalui peningkatan kinerja dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi Ketiga Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dapat diartikan bahwa kebangkitan ekonomi berbasis sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar terutama di sektor prioritas lebih diunggulkan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan. Disamping itu perlu pula percepatan pembangunan ekonomi kawasan melalui pengembangan infrastruktur dan integrasi wilayah lokal, regional, nasional dan global

2.2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tgl 31 Desember 2021 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yang berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2021 melakukan penetapan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tgl 31 Desember 2021.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 tersebut, maka DPPKBPMK Kabupaten Belitung mendukung dalam pencapaian Misi Kesatu, yaitu: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Belitung maka DPPKBPMK Kabupaten Belitung merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu lima tahun ke depan sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Belitung dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, yaitu :

Tabel. 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Misi 1 : Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat Yang Berkeadilan			
Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	1. Mengoptimalkan Advokasi, KIE dan Konseling	1. Meningkatkan kompetensi tenaga KIE 2. Meningkatkan SDM/Kader/IMP 3. Mengoptimalkan perbandingan jumlah PKB dengan wilayah Binaan
		2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kegiatan (Poktan)	1. Meningkatkan kompetensi Kader Poktan 2. Mengatasi keterbatasan tenaga/SDM pada pengelola Ketahanan Keluarga
		3. Meningkatkan kualitas Kader Institusi Masyarakat Pedesaan 4. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB di Lapangan 5. Mengoptimalkan kualitas informasi data program KKBPK yang belum optimal	Meningkatkan kemampuan dan memotivasi kader IMP untuk pelaksanaan advokasi dan KIE kepada masyarakat terhadap program KKBPK Meningkatkan rasio penyuluh KB terhadap jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Belitung 1. Meningkatkan kesadaran petugas KB dan pelaksana kelompok kegiatan tentang kualitas data program KKBPK 2. Meningkatkan kemampuan petugas KB dan pelaksana kelompok kegiatan dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara online. 3. Meningkatkan kuantitas tenaga/SDM pada pengelolaan Ketahanan Keluarga
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa 2. Meningkatkan akuntabilitas administrasi dan pelaporan pengelolaan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas SDM Perangkat Desa • Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dalam pengadministrasian kegiatan pemerintahan dan keuangan desa

		<p>3. Mengoptimalkan pengembangan lembaga ekonomi desa</p> <p>4. Mengoptimalkan penerapan TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah</p> <p>5. Mengoptimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa • Mengoptimalkan pembinaan dalam pengembangan lembaga ekonomi desa • Mengoptimalkan pemanfaatan hasil TTG di masyarakat. • Menciptakan TTG yang mendukung kebutuhan masyarakat dan potensi daerah • Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga adat • Meningkatkan rasa kegotong royongan di masyarakat • Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di desa
--	--	--	--

2.2.3 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKBPMK Kab. Belitung sesuai Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan IKU Nomor 76 Tahun 2021 tgl 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKBPMK Kab. Belitung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang		1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,28	1,93	2,70	2,70	2,70

			2. Total Fertility Rate (TFR)	2.30	2,42	2,23	2.22	2,21
		Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	Meningkatnya Persentase PUS (Pasangan Usia Subur) ber-KB	0,25%	0.25%	0,25%	0,50%	0,75%
			2.Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	12,49	13,99	12.37	12,67	13,00
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Jumlah desa dengan IDM Desa Maju	20	23	29	31	33
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Peningkatan jumlah Desa Maju	100	15	8,7	12	10.7

Catatan: *Persentase Peningkatan jumlah Desa Maju setiap tahunnya dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya*

Indikator Kinerja Utama tersebut di atas adalah Indikator Kinerja Utama dari DPPKBPMMD Kab. Belitung selaku OPD pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Selain Indikator Utama tersebut di atas juga terdapat indikator kinerja penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi jangung jawab OPD dalam mengoptimalkan capaian kinerjanya. Indikator ini terdapat dalam dokumen Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, namun tidak menjadi bagian dari dokumen IKU Perangkat Daerah. Indikator kinerja tersebut adalah indikator kinerja penunjang urusan pemerintah daerah yaitu indikator kinerja **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** yang merupakan indikator dari sasaran penunjang **Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas** dengan dengan target capaian kinerja pada tahun 2022 berada pada skala 3,28.

2.2.4 Perjanjian kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Dengan mengacu pada dokumen rencana strategis Tahun 2018-2023 DPPKBPMMD Kab. Belitung dan sumber daya anggaran yang ada, DPPKBPMMD Kab. Belitung telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2022. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama DPPKBPMMD Kab. Belitung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung mengacu pada Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	1.	- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,70%
		2.	- Total Fertility Rate (TFR)	2,22
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	3.	- Meningkatnya Persentase PUS (Pasangan Usia Subur) ber-KB	0,50%
		4.	- Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	12,67%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.	Jml desa dengan IDM Desa Maju	31 Desa
4	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Maju	12%

Total anggaran DPPKBPMMD Kabupaten Belitung adalah sebesar Rp. 11.004.683.700 (sebelas milyar empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5

Rincian Anggaran Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Program	Anggaran 2022	Ket
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5.522.263.569	
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.009.712.731	
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	479.902.450	
4	Program Pengendalian Penduduk	40.666.000	
5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	659.417.550	
6	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.292.721.400	
	Total	11.004.683.700	

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program-program yang ada dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja). Dalam penyusunan Rencana Kinerja memuat sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2022, dimana sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan memuat informasi yang meliputi:

- a. Indikator Kinerja
- b. Rencana Tingkat Capaian (Target)
- c. Program yang akan dilaksanakan
- d. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program
- e. Indikator Kinerja kegiatan, antara lain:
 - Masukkan (input)
 - Keluaran (Output)
 - Hasil (Out Comes)
 - Manfaat (Benefist)
 - Dampak (Impacts)

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan PD DPPKBPM Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Administrasi Pemerintahan Desa

8. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 -
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

9. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Program Pengendalian Penduduk

10. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

11. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
12. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - Sub Kegiatan Penggerakan Kader Intistusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
13. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

14. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
15. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

DPPKBPMK Kab. Belitung berkewajiban melaksanakan akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Belitung.

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2022, DPPKBPMK Kab. Belitung berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Capaian kinerja DPPKBPMK Kab. Belitung Tahun 2021 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja DPPKBPMK Kab. Belitung selama Tahun 2022. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Predikat Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kode
1	Sangat baik	>90	
2	Baik	75 – 89,99	
3	Cukup	65 – 74,99	
4	Kurang	50 – 64,99	
5	Sangat kurang	0 – 49,99	

3.1 CAPAIAN KINERJA PD PADA TAHUN 2022

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. DPPKBPMK Kab. Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor 76 Tahun 2021. Dan sesuai Renstra PD DPPKBPMK Kab. Belitung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 khususnya pada Misi ke-1 (satu) RPJMD yaitu ***Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.***

Dalam laporan ini, PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2022.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung Tahun 2022 yang ditandatangani tanggal 20 Januari 2022 dan Perubahan Perjanjian Kinerja PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung Tahun 2022 yang ditandatangani pada tanggal 09 Desember 2022 telah ditetapkan 4 (empat) tujuan/sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan/Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) - Total Fertility Rate (TFR)	2,70% 2,22
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	- Meningkatnya Persentase PUS ber KB - Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	0,50% 12,67%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa dengan IDM Desa Maju	31 Desa
4	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	12%

Gambaran perbandingan tujuan/ sasaran strategis PD DPPKBPM Kabupaten Belitung tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.4

Tujuan/Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator PD DPPKBPM Kabupaten Belitung

Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	2 indikator
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	2 indikator
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 indikator
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 indikator

Hasil pengukuran atas indikator kinerja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Utama DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja
Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,70%	1,23%	219,51%	Sangat Baik
	- Total Fertility Rate (TFR)	2,22	2,08	106,73 %	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	- Meningkatnya persentase PUS ber KB	0,50%	0,40%	80,00%	Baik
	- Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	12,67%	14,40%	113,65%	Sangat Baik
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa dengan IDM Desa Maju	31 Desa	37 Desa (28 Desa Maju dan 9 Desa Mandiri)	119,35%	Sangat Baik
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	12%	27.58%	229,83%	Sangat Baik

Analisis Perbandingan

Berdasarkan Tabel 3.3. terdapat 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 6 Indikator Kinerja Sasaran yang tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Dari 6 indikator tersebut terdapat 5 indikator melebihi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator di bawah target yang ditetapkan, namun pencapaiannya baik.

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2021	2022		
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,26	1,23	0,03	
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,42	2,08	0,34	
3	Persentase PUS ber KB	%	0,55	0,40	-0,15	
4	Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	%	15,08	14,40	-0,68	
5	Jumlah desa dengan IDM Desa Maju	Jumlah Desa	29 desa	37 desa	8 Desa	Laporan Rekapitulasi Indeks Desa Membangun, Pada Tahun 2022 target Desa dengan IDM Desa Maju sebanyak 31 Desa, dari hasil pendataan IDM Tahun 2022 diperoleh hasil sebanyak 28 Desa Maju dan 9 Desa Mandiri.
6	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	%	8,70	27,58%	18,88%	Ada kenaikan sebesar 18,88%

Analisis Perbandingan

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya realisasi capaian kinerja mengalami peningkatan dan mencapai target, bahkan sebagian besar mampu melampaui dan melebihi target yang telah ditetapkan.

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan RPJMD yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka berikutnya adalah melakukan perbandingan antara realisasi kinerja dibandingkan dengan RPJMD yang terdapat dalam target akhir dokumen Renstra PD DPPKBPM Kabupaten Belitung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Renstra 2022
		Target	Realisasi	Capaian dalam %	
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,70%	1,23%	219,51	2,70%
2	Total Fertility Rate (TFR)	2.22%	2,08%	106,73	2.22%
3	Meningkatnya Persentase PUS ber KB	0,50%	0,40%	80,00	0,50%
4	Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	12,67%	14,40%	113,65	12,67%
5	Jumlah desa dengan IDM Desa Maju	31 desa	37 desa	119,35	31 desa
6	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	12%	27,58%	229,83	12%

Analisis Perbandingan

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra PD DPPKBPMK Kab. Belitung Tahun 2018-2023, dari 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 6 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) PD DPPKBPMK Kab. Belitung pada Tahun 2022, 5 diantara indikator kinerja terealisasi sesuai target bahkan melebihi target yang ditetapkan dan 1 indikator pencapaian kinerjanya di bawah target, namun masih dalam kriteria baik. Perbandingan antara realisasi kinerja dibandingkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian 2021 terhadap target akhir Renstra 2023
			Target	Realisasi	Capaian dalam %		
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,26	2,70%	1,23%	219,51	2,70%	219,51%
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,42	2.22%	2,08%	106,73	2,21	106,25%
3	Meningkatnya Persentase PUS ber KB	0,55	0,50%	0,40%	80	0,75	53,33%
4	Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	15,08	12,67%	14,40%	113,65	13,00	110,77%
5	Jumlah desa dengan IDM Desa Maju	29 desa	31 desa	37 desa	119,35	33 desa	112,12%
6	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	8,7%	12%	27,58%	229,83	10,7%	257,76%

3.4 Review atas Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berikutnya adalah melakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja DPPKBPMK Kabupaten Belitung Tahun 2022. dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun pada Rencana Strategis DPPKBPMK Kab. Belitung tahun 2018-2023. Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja

DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.9
**Review dan Perbandingan
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2018-2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,65 %	2,28 %	1,93 %	1,26 %	1,23 %		86,04 %	139,89 %	214,29 %	219,51 %	
	2. Total Fertility Rate (TFR)	2,28 %	2,30 %	2,42 %	2,42 %	2,08 %		99,13 %	92,14 %	92,15 %	106,73 %	
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	1.. Meningkatkan Persentase PUS ber KB	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,55 %	0,40 %		100 %	100 %	220 %	80,00 %	
	2. Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	11,48 %	12,49 %	13,99 %	15,08 %	14,40 %		104,08 %	113,74 %	121,82 %	113,65 %	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa dengan IDM Desa Maju	10 Desa	20 Desa	23 Desa	29 Desa	37 Desa		100 %	100 %	100 %	119,35 %	
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	400 %	100 %	15 %	8,7 %	27,58 %		100 %	100 %	100 %	229,83 %	

*catatan: Jumlah Desa dengan IDM Desa Maju pada Tahun 2017 : 2 Desa

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja DPPKBPM Kab. Belitung Tahun 2021 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 3.10
**Capaian Indikator Kinerja
DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2022
Berdasarkan Persentase**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	-
>100	Melebihi target	5

Dengan demikian terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak memenuhi capaian target kinerja yakni: Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP dengan capaian 80,00%, tapi masih dalam kategori pencapaian yang baik.

Ada 5 (lima) indikator kinerja yang pencapaian kerjanya sangat melebihi target yang telah ditetapkan yaitu:

- (1). Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan capaian 219,51%,
- (2). Total Fertility Rate (TFR) dengan capaian 106,73%,
- (3). Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP dengan capaian 113,65%,

- (4). Jumlah desa dengan IDM Desa Maju dengan capaian 119,35%,
 (5). Persentase peningkatan jumlah Desa Maju dengan persentase capaian 229,83%

Jika dilihat berdasarkan katagori maka capaian kinerja utama DPPKBPM Kabupaten Belitung dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.11

**Capaian Indikator Kinerja
 DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2022
 Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	5
2	Baik	75 – 89,99	1
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari Table 3.11 diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja DPPKBPM Kabupaten Belitung pada Tahun 2022 berada pada katagori "**Sangat Baik**" (nilai capaian >90) yang dicapai pada 5 (lima) indikator, dan 1 (satu) indikator berada pada kategori "**Baik**" (nilai capaian 75 – 89,99). Dengan demikian jika dilihat dari katagori yang ada secara umum kinerja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung berada dalam katagori "**Sangat Baik**".

Dengan 4 tujuan/sasaran strategis dan 6 indikator kinerja yang ditargetkan PD DPPKBPM Kabupaten Belitung dapat merealisasikan capaian untuk masing-masing sasaran strategis sebanyak 5 indikator tercapai melebihi target dan 1 indikator masih berada di bawah target yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12

**Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
 PD DPPKBPM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022**

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran %	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	2	163,12	Sangat Baik
2	Sasaran Strategis 2	2	96,83	Sangat Baik
3	Sasaran Strategis 3	1	119,35	Sangat Baik
4	Sasaran Strategis 4	1	229,83	Sangat Baik

Berdasarkan nilai skor yang diperoleh secara keseluruhan capaian kinerja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung berada dalam kategori **sangat baik** untuk semua indikator dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13

**Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2022**

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Sasaran Strategis 1	2	163,12					√
2.	Sasaran Strategis 2	2	96,83					√
3.	Sasaran Strategis 3	1	119,35					√
4.	Sasaran Strategis 4	1	229,83					√

Pencapaian target tujuan/sasaran strategis PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2022 masing-masing sasaran strategis sebagai berikut: 2 indikator tujuan strategis satu memperoleh capaian melebihi target (>100%), 2 indikator kinerja sasaran strategis dua memperoleh capaian di bawah target (<100%). Sasaran strategis tiga dan empat juga memperoleh capaian melebihi target (>100%). Untuk lebih jelas pencapaian target sasaran strategis DP DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14

**Pencapaian Target Tujuan/Sasaran Strategis
PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2022**

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Sasaran Strategis 1	2	163,12	2	163,12	-	-	-	-
2.	Sasaran Strategis 2	2	96,83	-	-	-	-	2	96,83
3.	Sasaran Strategis 3	1	119,35	1	119,35	-	-	-	-
4.	Sasaran Strategis 4	1	229,83	1	229,83	-	-	-	-

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2022 sasaran strategis satu rata-rata capaian kinerja sasaran 163,12%, sasaran startegis dua rata-rata capaian kinerja sasarnya 96,83% sasaran startegis tiga rata-rata capaian kinerja sasarnya 119,35% dan sasaran startegis empat rata-rata capaian kinerja sasarnya 229,83%

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis DPPKBPM Kab. Belitung dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang

Rata-rata hasil capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15

Capaian indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,70	1,23	219,51%
	- Total Fertility Rate (TFR)	%	2,22	2,08	106,73%
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran					163,12%

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada table berikut:

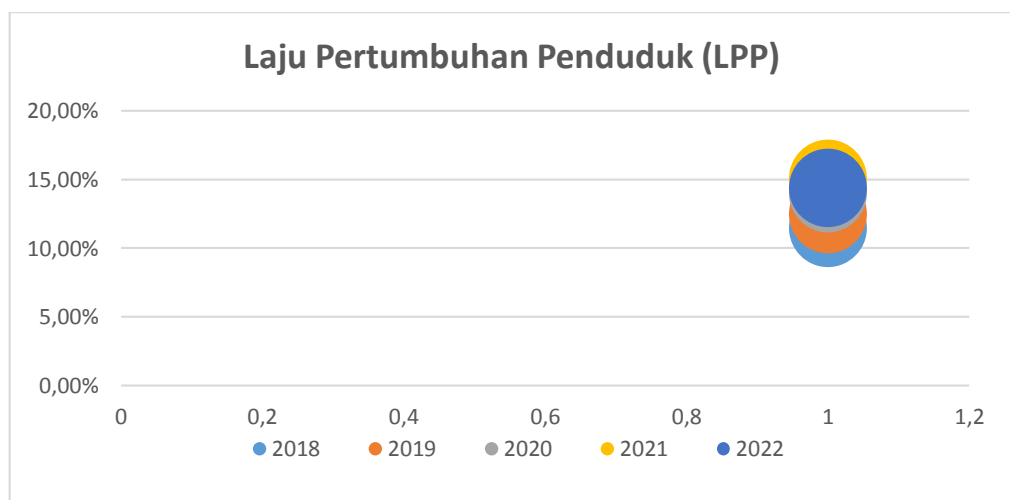
Tabel 3.16

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2021	2022		
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,26	1,23	0,03	
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,42	2,08	0,34	

Dari Tabel diatas jika dilihat perbandingan untuk setiap indikator kinerja selama tahun Renstra berjalan adalah sebagai berikut:

1). Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)



Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator kinerja "Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)" pada tahun 2022 menurut data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung mencapai 1,23%. Atau **meningkat** 0,03% dari kondisi awal tahun 2021 sebesar 1,26% dengan perbandingan capaian tahun 2022 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPM Kabupaten Belitung tahun 2023

telah mencapai 219,51%. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. LPP berguna untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Walaupun banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk seperti faktor migrasi dan tingkat kelahiran, namun tetap harus ada upaya untuk menekan angka Laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program Pengendalian Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sehingga dapat mencapai atau hampir mendekati angka yang ditargetkan pada tahun akhir Renstra.

Dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, upaya untuk meningkatkan capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi melalui langkah-langkah:

- 1). Melaksanakan penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral melalui kegiatan Kampung KB.
- 2). Mengoptimalkan kegiatan di balai penyuluhan KB di tiap kecamatan.
- 3). Pembinaan yang intensif kepada Kader IMP.
- 4). Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang menyeluruh dan terus menerus terhadap kualitas informasi dan data program Bangsa Kencana
- 5). Meningkatkan komitmen bersama terhadap Program Keluarga Berencana antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat di semua tingkatan.

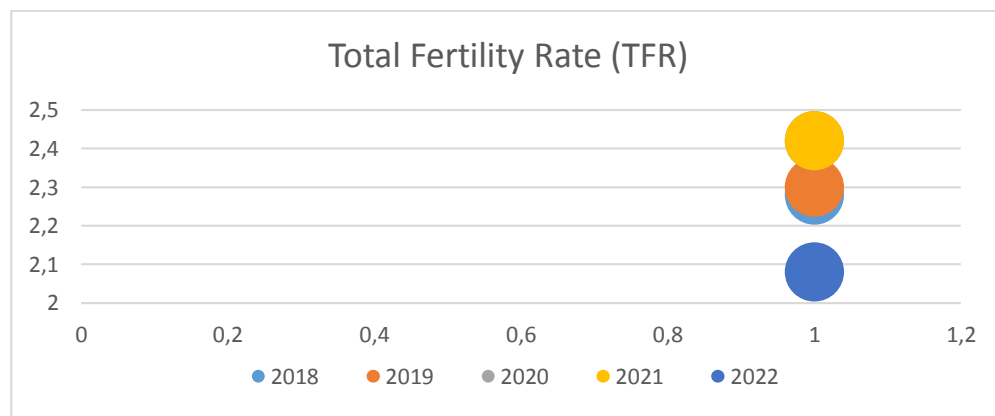
Faktor yang mendorong peningkatan capaian kinerja adalah

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana dan perencanaan berkeluarga.
- 2) Meningkatnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang oleh masyarakat.
- 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola perilaku hidup sehat.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

- 1) Masih rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelompok kegiatan baik untuk menjadi kader pengelola maupun sebagai anggota kelompok kegiatan dan
- 2) Masih adanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menolak program Keluarga Berencana dikarenakan bertolak belakang dengan kepercayaan yang dianut.

2). Total Fertility Rate (TFR)



Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Belitung pada tahun 2022 adalah 2,08%. Artinya bahwa pencapaian tersebut pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 0,34% dari tahun 2021 (2,42%). Untuk perbandingan capaian kinerja

tahun 2022 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah sebesar 106,25% atau telah melebihi target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 sebanyak 6,25%.

Meskipun pencapaian kinerja telah di atas target yang ditetapkan, namun tetap saja terdapat permasalahan atau faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja seperti:

- 1) Belum idealnya rasio jumlah PKB/PLKB terhadap wilayah binaan, rasio yang ideal adalah 1 orang PKB/PLKB membina 2 desa/kelurahan
- 2) Belum maksimalnya kinerja PKB/PLKB dalam melakukan pembinaan terhadap wilayah binaannya
- 3) Masih tingginya jumlah angka pernikahan dini di Kabupaten Belitung
- 4) Masih rendahnya capaian cakupan pencatatan dan pelaporan Pelayanan KB dan Pengendalian Lapangan

Sedangkan permasalahan yang menjadi factor pendorong pencaipan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya minat masyarakat terhadap pemakaian alat dan obat kontrasepsi.
- 2) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat perencanaan berkeluarga.
- 3) Meningkatnya peran serta petugas lini lapangan dalam melaksanakan tugas KIE program Bangsa Kencana.
- 4) Berfungsinya Balai Penyuluhan KB di tiap kecamatan secara optimal.
- 5) Meningkatnya pengetahuan masyarakat di Kampung KB tentang Program Bangsa Kencana.

Solusi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang datang adalah:

- 1) Penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral.
- 2) Pembinaan yang lebih intensif kepada kader IMP.
- 3) Memberikan pembinaan kepada PKB/PLKB, mitra kerja serta kader di lini lapangan terkait pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dan pengendalian lapangan
- 4) Melakukan perekrutan dan optimalisasi tenaga Penyuluh Lapangan KB untuk meningkatkan pelaksanaan promosi dan pelayanan program KB kepada masyarakat.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana

Rata-rata hasil capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17

Capaian indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	- Meningkatnya Persentase PUS ber KB	%	0,50	0,40	80%
	- Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	%	12,67	14,40	113,65%
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran					96,83%

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.18

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2021	2022		
1	Meningkatnya Persentase PUS ber KB	%	0,55	0,40	-0,15	
2	Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	%	15,08	14,40	-0,68	

Dari Tabel diatas jika dilihat perbandingan untuk capaian kinerja sasaran 2 selama tahun Renstra berjalan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya Persentase PUS ber KB



Indikator "Meningkatnya Persentase PUS ber KB " pada tahun 2022 adalah 0,40%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Persentase PUS ber KB pada tahun 2021 mengalami penurunan pencapaian sebesar 0,15% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 kondisi Persentase PUS ber KB adalah 0,55%. Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2022 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 yang diharapkan mencapai 0,75% atau lebih adalah sebesar 53,33%. Ada beberapa faktor yang sangat mendukung dalam upaya meningkatkan capaian Persentase PUS ber KB diantaranya adalah:

1. Undang-undang dan peraturan untuk pelaksanaan Program KKBPK.
2. Komitmen Pemerintah Daerah dalam pembangunan KKBPK.
3. Dukungan dana, sarana dan prasarana baik APBN/DAK dan APBD.
4. Kerjasama yang baik dengan mitra kerja baik instansi vertikal dan OPD terkait dilingkungan Pemkab Belitung.
5. Peran serta Pemerintahan desa di lini lapangan.
6. Adanya penambahan tenaga PLKB Non ASN.

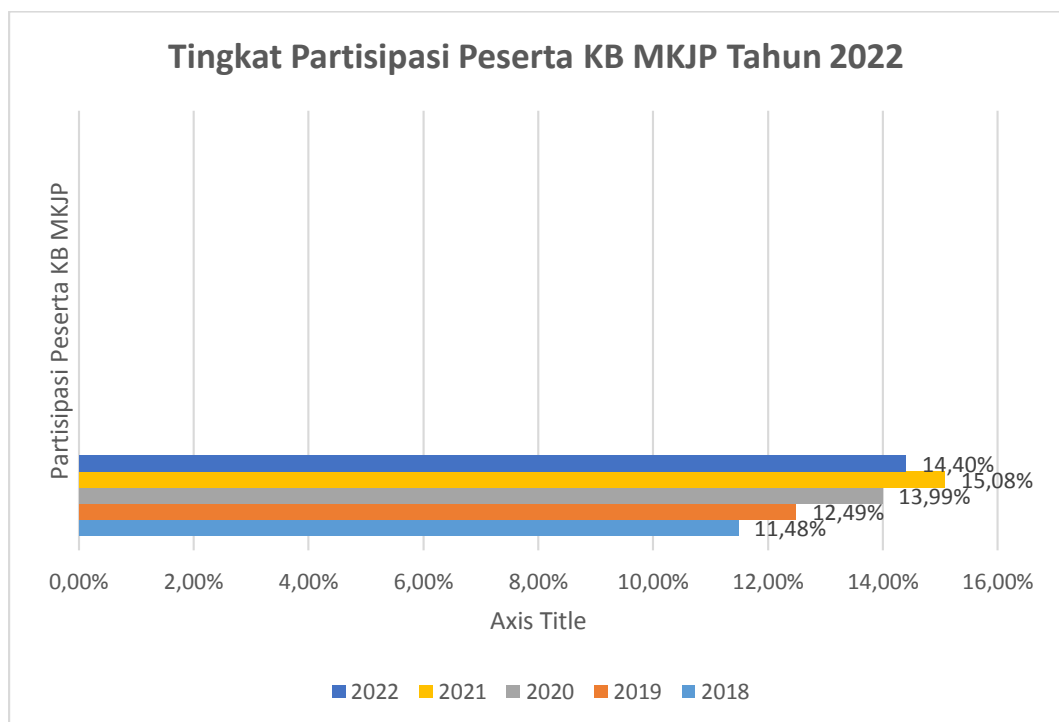
Upaya untuk meningkatkan capaian Persentase PUS ber KB pada tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) mengoptimalkan promosi KB di masyarakat melalui berbagai media promosi diantaranya media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman

dan pengetahuan pasangan usia subur tentang pentingnya mengetahui kontrasepsi yang tepat sasaran, 2) memanfaatkan hasil pendataan keluarga untuk mengetahui target akseptor KB agar KIE tepat sasaran, 3) meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan program KB.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

- 1) Masih adanya stigma di masyarakat mengenai keinginan mendapatkan anak dengan kelamin yang berbeda,
- 2) Adanya ketakutan tertentu terhadap rumor negatif yang beredar di masyarakat mengenai alat kontrasepsi (misal KB MOP (vasektomi) dapat menurunkan libido pria, KB suntik/pil yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan pada wanita)

4). Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP



Indikator “Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP” pada tahun 2022 adalah 14,40%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP pada tahun 2022 mengalami penurunan pencapaian sebesar 0,68% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 kondisi Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP adalah 15,08%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 yang diharapkan mencapai angka 13,00% atau lebih telah melampaui target yaitu sebesar 110,77%. Namun dengan pencapaian seperti kondisi sekarang ini harus tetap membutuhkan upaya yang lebih serius agar Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP pada tahun-tahun mendatang terus meningkat. Langkah yang dilakukan adalah:

- a. melakukan pemetaan sasaran KIE KB MKJP dengan memanfaatkan hasil Pendataan Keluarga,
- b. meningkatkan partisipasi pria dalam berKB dan kesehatan reproduksi,
- c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan KIE KB MKJP dari pengelola, pelaksana dan kader sebagai provider melalui orientasi dan pelatihan tentang KB dan Kesehatan Reproduksi,

- d. mengoptimalkan promosi KB MKJP di masyarakat sehingga meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pasangan usia subur tentang KB MKJP dan kesadaran untuk menggunakan MKJP semakin tinggi,
- e. penggarapan Kampung KB secara intensif.

Dalam pelaksanaannya tentu terdapat kendala atau faktor penghambat pencapaian kinerja seperti misalnya:

- a. kondisi lingkungan sosial budaya di sebagian masyarakat yang masih menganggap KB merupakan urusan perempuan dimana keputusan untuk ber-KB diserahkan kepada kaum perempuan,
- b. rumor negatif yang beredar di masyarakat mengenai alat kontrasepsi.

Dengan demikian solusi dan rekomendasi yang dapat diambil dalam peningkatan kinerja adalah :

- a. optimalisasi media elektronik dan media sosial sebagai ajang promosi dan advokasi kepada masyarakat tentang KB MKJP dan KB Pria,
- b. meningkatkan peran Institusi Masyarakat (Kelompok KB, IMP, PKK) dalam Konseling Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi.

Untuk mengupayakan pencapaian sasaran strategis 1 dan 2 PD DPPKBPMMD Kab. Belitung melaksanakan program-program, yaitu:

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pencapaian indikator kinerja program-program tersebut pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19

Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (GDPK)	70,00	70,00	100	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,00	14,40	102,86	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase PUS Ber KB	77	78,95	102.53	

Analisa penyebab keberhasilan dan hambatan pencapaian indikator kinerja program

1. **Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (GDPK)** adalah indikator kinerja Program Pengendalian Penduduk, pada tahun 2022 pencapaian kinerja indikatornya adalah sebesar 70% dari target yang ditetapkan sebesar 70% atau sama dengan 100% pencapaian target.

Hal yang menjadi faktor pendorong tercapai indikator kinerja program ini adalah:

1. Tersedianya dokumen dan peraturan terkait Grand Design Pembangunan Kependudukan;
2. Terlibatnya beberapa perangkat daerah dalam penyusunan dokumen GDPK;
3. Tersedianya peta jalan (*roadmap*) pembangunan kependudukan sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan kependudukan Kabupaten Belitung.

Hal-hal yang menjadi faktor penghambat pencapaian indikator kinerja adalah:

1. Masih ada perangkat daerah yang belum memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (GDPK);

2. Kurangnya pemahaman terhadap data yang disajikan di dokumen GDPK

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang timbul adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah lainnya terkait pemanfaatan GDPK;

2. Mengadakan sosialisasi terkait pemanfaatan data yang disajikan di dokumen GDPK.

2. **Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)** adalah indikator dari Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), pada tahun 2022 pencapaian kinerja indikatornya adalah sebesar 14,40% dari target yang ditetapkan sebesar 14,00%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan maka pencapaiannya setara 102,86% dan melebihi 2,86% dari target Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja adalah

1. Meningkatnya peran kader IMP dalam memberikan KIE KB MKJP kepada masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya dukungan dana BOKB (DAK Non Fisik) bagi pelaksanaan KIE oleh Kader IMP.

2. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak provider yang terlatih melayani pelayanan KB MKJP sehingga meningkatkan kepercayaan di masyarakat untuk menggunakan KB MKJP.

3. Meningkatnya minat masyarakat terkait pemakaian KB MKJP karena lebih efisien dan ekonomis.

Hal-hal yang menjadi faktor penghambat untuk optimalnya pencapaian kinerja antara lain dikarenakan adanya ketakutan masyarakat akan efek samping maupun rumor kegagalan saat pemasangan alat kontrasepsi MKJP

Solusi yang ditetapkan dalam mengatasi hambatan yang timbul adalah

1. Melaksanakan penguatan kapasitas dan kompetensi penyuluh KB dan petugas pengelola program Bangsa Kencana lainnya di lapangan (kader IMP, kader kelompok kegiatan) agar dapat melakukan advokasi dan KIE program Bangsa Kencana secara maksimal kepada masyarakat.

2. Meningkatkan advokasi dan KIE melalui media elektronik dan tradisional terkait penggunaan KB MKJP kepada masyarakat.

3. **Persentase PUS Ber KB adalah Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** pada tahun 2022 adalah sebesar 78,95% dari target yang ditetapkan sebesar 77%. Capaian indikator kinerja Persentase PUS Ber KB pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,4% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 78,55%

Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja dikarenakan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pemakaian alat dan obat kontrasepsi sebagai upaya mengatur kelahiran dan semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan dalam berkeluarga.

dukungan dana baik APBD dan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Reguler Sub Bidang KB (BOKB) serta koordinasi yang baik dengan mitra kerja terkait.

Sedangkan hal-hal yang menjadi faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja karena:

1. Cakupan hasil pelayanan KB yang dicatat dan dilaporkan pada aplikasi New SIGA (Sistem Informasi Keluarga) masih rendah dikarenakan keterbatasan jumlah dan pengetahuan SDM.

2. Pengurangan angka Jumlah Pasangan Usia Subur karena filterisasi pada aplikasi pelaporan Pelayanan KB (aplikasi New SIGA) dimana ketika PUS sudah mencapai usia diatas 49 tahun, maka data PUS tersebut akan otomatis

dikeluarkan datanya oleh sistem. Sedangkan di kondisi lapangan banyak ditemui pasangan usia 49 tahun keatas masih dalam kondisi subur dan menggunakan alat kontrasepsi.

3. Beredarnya rumor negatif di masyarakat terkait efek samping penggunaan alat dan obat/cara kontrasepsi terutama metode modern (sebagai contoh: penggunaan suntik KB/konsumsi Pil KB dapat menaikkan berat badan atau menimbulkan jerawat/flek pada wajah) menyebabkan masyarakat lebih memilih metode tradisional (contoh : KB kalender, konsumsi jamu) sebagai upaya ber-KB.
4. Masih adanya masyarakat yang beranggapan bahwa pemakaian alat dan obat kontrasepsi sebagai upaya mengatur kelahiran bertentangan dengan ajaran agama/kepercayaan tertentu.

Tindakan yang dilakukan sebagai upaya solusi untuk mengatasi hambatan yang timbul adalah

1. Meningkatkan cakupan capaian pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB melalui peningkatan kapasitas pengelola data hasil pelayanan KB (penyuluh KB, kader poktan, bidan/tenaga Kesehatan di fasilitas Kesehatan)
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait sistematika pencatatan dan pelaporan pelayanan KB
3. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan KIE terus menerus kepada masyarakat terkait pentingnya perencanaan dalam berkeluarga.

Ketiga program di atas adalah pendukung pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan untuk mendukung tercapainya target kinerja program yang telah ditetapkan masing-masing program mengupayakannya melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sebagai berikut:

Tabel 3.20
Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (GDPK)		
	Anggaran		-	40.666.000
	Realisasi		-	39.503.014
	%		-	97,14
	Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Output</i> : Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas penduduk <i>Outcome</i> : Terlaksananya kebijakan tentang pengendalian kuantitas penduduk		
	Anggaran		-	40.666.000
	Realisasi		-	39.503.014
	%		-	97,14
	Sub Kegiatan :	- Jumlah Dokumen Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan		

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal	Kependudukan jalur Pendidikan Formal		
	Anggaran		-	40.666.000
	Realisasi		-	39.503.014
	%		-	97,14
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
	Anggaran		1.619.860.455	659.417.550
	Realisasi		1.561.356.975	645.537.350
	%		88,17	97,90
	Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	<i>Output</i> : Sarana dan Prasarana di Balai Penyuluhan KB <i>Outcome</i> : Meningkatnya kualitas Bangsa Kencana di Balai Penyuluhan KB		
	Anggaran		1.242.847.440	112.500.000
	Realisasi		1.191.630.000	112.009.500
	%		95,88	99,56
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		
	Anggaran		1.059.840.000	112.500.000
	Realisasi		1.029.930.000	112.009.500
	%		97,18	99,56
	Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<i>Output</i> : Penyuluh KB/PLKB <i>Outcome</i> : Meningkatnya Partisipasi dalam ber KB		
	Anggaran		326.140.900	502.540.900
	Realisasi		324.872.800	501.334.400
	%		99,61	99,76
	Sub Kegiatan : Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
	Anggaran		-	176.400.000
	Realisasi		-	176.400.000
	%		-	100,00
	Sub Kegiatan : Penggerakan Kader Intistusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	- Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Intistusi Masyarakat Pedesaan (IMP) - Peserta PPKBD dan Sub PPKBD		

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Anggaran		326.140.900	326.140.900
	Realisasi		324.872.800	324.934.400
	%		99,61	99,63
	Kegiatan : Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Output</i> : Laporan Pendistribusian alokon <i>Outcome</i> : Terpenuhinya kebutuhan alokon untuk penyuluhan KB		
	Anggaran			44.376.650
	Realisasi			32.193.450
	%			72,55
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Jumlah orang yang mengikuti kesertaan Penggunaan Metode Konstrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
	Anggaran		50.872.115	44.376.650
	Realisasi		44.854.175	32.193.450
	%		88,17	72,55
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase PUS Ber KB		
	Anggaran		1.166.601.600	2.292.721.400
	Realisasi		918.205.500	1.530.934.225
	%		78,71	66,77
	Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Output</i> : Laporan Pelaksanaan Orientasi Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga <i>Outcome</i> : Meningkatnya kualitas Kader Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
	Anggaran		53.299.600	442.625.800
	Realisasi		48.153.650	435.483.300
	%		90,35	98,39
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- Jumlah unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Tersedianya KIT Siap Nikah Anti Stunting		
	Anggaran		-	369.000.000
	Realisasi		-	362.100.000
	%		-	98,13
	Sub Kegiatan: Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
	Anggaran		21.610.000	73.625.800
	Realisasi		21.442.250	73.383.300
	%		99,22	99,67
	Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Output</i> : Laporan pembinaan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga <i>Outcome</i> : Laporan Operasional pelaksanaan Program Bangga Kencana-		
	Anggaran		1.113.302.000	1.850.095.600
	Realisasi		870.051.850	1.095.450.925
	%		78,15	59,21
	Sub Kegiatan: Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
	Anggaran		1.113.302.000	1.850.095.600
	Realisasi		870.051.850	1.095.450.925
	%		78,15	59,21
TOTAL				
	Anggaran		2.786.462.055	2.992.804.950
	Realisasi		2.479.562.475	2.215.974.589
	%		88,99	74,04

1. Program Pengendalian Penduduk, pada tahun anggaran 2021 dilaksanakan dengan alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 40.666.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.503.014,- setara dengan 97,14% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- **Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.** Capaian kinerja kegiatan ini pada tahun 2022 adalah 97,14%.

Kerjasama serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait (dalam hal ini adalah sekolah SMP dan SMA/Kejuruan sederajat Kab. Belitung yang menjadi sasaran kegiatan) sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan lancar adalah merupakan faktor pendorong paling utama dalam upaya pencapaian target kinerja kegiatan.

Hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja kegiatan adalah:

- Jadwal pelaksanaan kegiatan sering mengalami perubahan dikarenakan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan sekolah yang bersangkutan.
- Kurangnya pemahaman guru yang membidangi kurikulum tentang Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40.666.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.503.014,- atau 97,14% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah

- Faktor pendorong pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan lancar karena adanya kerjasama dan koordinasi yang intens dengan pihak sekolah yang menjadi sasaran.
- Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan salah satunya adalah masih kurangnya anggaran kegiatan untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan sekolah siaga kependudukan karena di tahun 2022 alokasi dana hanya untuk 10 sekolah saja.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- (1) Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal



Gambar 1 : Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan bagi siswa-siswa SMA/SMK dan SMP dalam rangka sub kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal

Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan adanya respon positif dari pihak sekolah terkait pelaksanaan sub kegiatan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan kerjasama dan koordinasi yang baik.

Faktor penghambat capaian kinerja sub kegiatan dikarenakan Jadwal pelaksanaan kegiatan mengalami banyak perubahan dan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan sekolah-sekolah yang bersangkutan (karena terbentur pelaksanaan jadwal ulangan/libur sekolah).

- 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan dengan alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 659.417.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 645.537.350,- setara dengan 97,90% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- **Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.**

Output kegiatan adalah: Sarana dan Prasarana di Balai Penyuluhan KB dan *outcome* yang ditetapkan untuk kegiatan ini adalah : meningkatnya kualitas Bangsa Kencana di Balai Penyuluhan KB

Capaian kinerja kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan Indikator kinerja Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2022 adalah 14,40%, lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 14,00%.

- Faktor pendorong pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal karena kerjasama dan koordinasi yang intens dari pihak terkait (pelaksana kegiatan, penyedia, dan unit pengadaan barang/jasa)
- Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan karena terbatasnya waktu dalam pelaksanaan kegiatan

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 112.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 112.009.500,- atau 99,56% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi capaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :



Gambar 2 : Kursus Calon Pengantin di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Balai Penyuluhan KB

1. *Faktor Pendorong*: tersedianya sarana dan prasana di Balai Penyuluhan KB se-Kabupaten Belitung sehingga Penyuluh KB/PLKB dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara baik serta memaksimalkan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai tempat advokasi dan KIE program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana kepada masyarakat.

2. *Faktor Penghambat* : proses pengadaan sarana prasarana Balai Penyuluhan KB mengalami kendala terkait nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan : Kerjasama dan koordinasi yang baik dari pihak pelaksana kegiatan, penyedia dan unit pengadaan barang/jasa sehingga pengadaan sarana dan prasarana di Balai Penyuluhan dapat dilaksanakan sesuai anggaran dan peraturan yang berlaku.

Faktor penghambat capaian kinerja sub kegiatan : Pada saat proses pengadaan barang/jasa mengalami sedikit kendala terkait nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang sedang dikampanyekan oleh pemerintah dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

- **Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**

Capaian kinerja kegiatan ini pada tahun 2022 adalah 99,76%. Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja kegiatan adalah :

- Faktor Pendorong : Mulai meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.

- Faktor Penghambat : Belum idealnya besaran insentif yang diterima dengan beban kerja yang dilakukan oleh PKB/PLKB dan Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) di lapangan.



Gambar 3: Penyampaian Materi pada acara Orientasi Tim Pendamping Keluarga Risiko Stunting oleh Petugas Lapangan Penyuluh KB

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 502.540.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 501.334.000,- atau 99,76% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah :

- Faktor pendorong : meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- Faktor penghambat: belum idealnya besaran insentif yang diterima PKB/PLKB dan Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) dengan tingginya beban kerja yang dilaksanakan dilapangan.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- (1) Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).

Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan : terlaksananya kinerja petugas lini lapangan (PKB/PLKB).

Faktor penghambat capaian kinerja sub kegiatan : belum idealnya rasio jumlah PKB/PLKB terhadap wilayah binaan. Adapun rasio idealnya yaitu 1 PKB/PLKB membina 2 desa/kelurahan.

- (2) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan : terlaksananya peningkatan kapasitas kader IMP dalam perannya membantu promosi program Bangga Kencana di lapangan.

Faktor penghambat capaian kinerja sub kegiatan : masih rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi menjadi kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) sehingga sering ditemui di beberapa wilayah yang menjadi kader IMP juga merangkap kader kelompok kegiatan lainnya sehingga pelaksanaan fungsi sebagai kader IMP tidak maksimal.

- **Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota**

Capaian kinerja kegiatan ini pada tahun 2022 adalah 72,55%. Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja kegiatan adalah :

- Faktor pendorong :

- Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pemakaian alat dan obat kontrasepsi sebagai upaya mengatur kelahiran;
- Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan dalam berkeluarga.
- Faktor penghambat :
 - Beredarnya rumor negatif di masyarakat terkait efek samping penggunaan alat dan obat/cara kontrasepsi terutama metode modern sehingga masyarakat lebih memilih metode konvensional dalam ber-KB.
 - Rendahnya capaian cakupan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di aplikasi New SIGA.
- Faktor pendorong: adanya kerjasama dan koordinasi lintas sektor yang baik dengan pihak provider lain terkait pelayanan keluarga berencana.
- Faktor penghambat:
 - Penyediaan barang medis habis pakai untuk obat pendamping pelayanan KB sudah disediakan oleh BKKBN.
 - Pelayanan KB di Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik tidak dapat dilaksanakan karena tidak efektif.



Gambar 4: Kunjungan Kepala BKKBN RI, Ketua TP PKK Provinsi Kep. Babel, Ketua DWP Prov. Kep. Babel dan Ketua Bhayangkari Prov. Kep. Babel ke Kampung KB Desa Keciput

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

(1) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan :

- meningkatnya minat masyarakat terhadap KB MKJP karena lebih efisien dan ekonomis
- kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan pelayanan KB MKJP

Faktor penghambat capaian kinerja sub kegiatan :

- pemenuhan barang medis habis pakai untuk pendamping pelayanan KB diselenggarakan oleh BKKBN.
- pelayanan KB di beberapa wilayah pulau (pulau gersik dan pulau sumedang) tidak dapat dilaksanakan karena tidak efektif.

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan dengan alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 2.292.721.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 66,77,- setara dengan 66,77% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- **Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** dengan *Output kegiatan berupa:* Laporan Pelaksanaan Orientasi Pembinaan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga dan *Outcome kegiatan berupa* Meningkatnya kualitas Kader Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Capaian kinerja kegiatan ini pada tahun 2022 adalah 98,39%. Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja kegiatan adalah :

- Faktor pendorong : tersedianya sarana untuk melaksanakan penyuluhan di kelompok kegiatan pada program pembangunan keluarga.
- Faktor penghambat : terbatasnya SDM pengelola kelompok kegiatan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 442.625.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 435.483.300,- atau 98,39% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah :

- Faktor pendorong adanya koordinasi lintas sektor yang baik dengan berbagai pihak terkait dan adanya dukungan anggaran (APBN maupun APBD) yang mendukung kegiatan
- Faktor penghambat karena terbatasnya SDM tenaga pengelola program Bangga Kencana di perangkat daerah



Gambar 5: Penandatanganan Kesepakatan antara DPPKBPM Kabupaten Belitung dan PT. Pos Indonesia terkait Penyediaan Paket Data/Pulsa untuk Operasional Surveillance Stunting bagi Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Belitung

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- (1) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan : kerjasama dan koordinasi antara pihak terkait (pelaksana kegiatan, penyedia dan lembaga pengadaan barang/jasa)

Faktor penghambat capaian kinerja sub kegiatan : proses pengadaan sedikit mengalami kendala terkait nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

- (2) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan : tingginya minat sasaran terutama remaja terhadap program ketahanan remaja

Koordinasi yang baik dengan mitra kerja dan lintas sektor

Faktor penghambat capaian kinerja sub kegiatan : kurangnya anggaran untuk mengakomodir kegiatan ketahanan remaja

- **Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam**

Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Output kegiatan berupa Laporan pembinaan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga *sedangkan outcome* kegiatan berupa Laporan Operasional pelaksanaan Program Bangga Kencana.

Capaian kinerja kegiatan ini pada tahun 2022 adalah 59,21%. Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja kegiatan adalah :

- Faktor pendorong :
tersedianya anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOKB adanya komitmen bersama dengan kementerian/lembaga dan daerah
- Faktor penghambat :
petunjuk teknis yang sulit diimplementasikan dengan kondisi daerah.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.850.095.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.095.450.925,- atau 59,21% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah :

- Faktor pendorong :
 - Berfungsinya balai penyuluhan KB sebagai tempat pelaksanaan program Bangga Kencana secara maksimal
 - Koordinasi dengan mitra kerja yang terjalin dengan baik
- Faktor penghambat :
 - pelaksanaan kegiatan operasional penurunan stunting mengalami keterlambatan
 - prosedur pelaksanaan penggerakan pelayanan KB MOW yang rumit

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- (1) Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan :

- Koordinasi antara PKB/PLKB, provider pelayanan, pihak kecamatan, desa/kelurahan berjalan dengan baik.
- Pendampingan, monitoring dan evaluasi secara terus menerus oleh kementerian/lembaga terkait pelaksanaan DAK Non Fisik (dalam hal ini BKKBN).



Gambar 6: Penyerahan Hadiah Pemenang Duta Genre Tingkat Kabupaten Belitung Tahun 2022

Faktor penghambat capaian kinerja sub kegiatan :

- Belum idealnya besaran insentif tim pendampingan keluarga (TPK) operasional percepatan penurunan stunting sehingga kader TPK tidak maksimal dalam melakukan pendampingan.
- Keterbatasan SDM pengelola dan pelaksana kegiatan BOKB di perangkat daerah.
- Tidak adanya anggaran untuk BBM dan sewa transportasi laut.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rata-rata hasil capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.21

Capaian indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Jumlah desa dengan IDM Desa Maju	Jumlah Desa	31 Desa	37 Desa (28 Desa Maju dan 9 Desa Mandiei)	119,35%
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran					119,35%

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.22

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

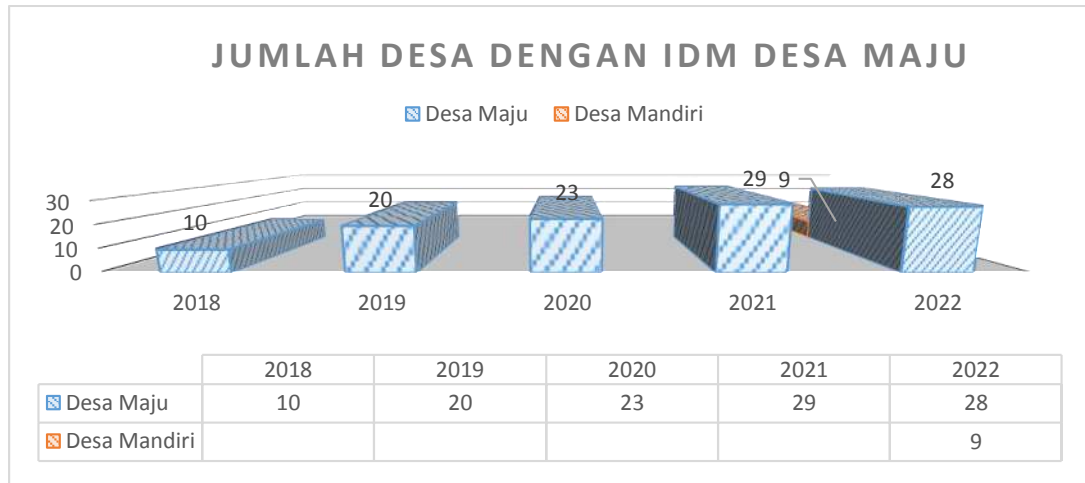
No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2021	2022		
1	Jumlah desa dengan IDM Desa Maju	Jumlah Desa	29 desa	37 desa	8 Desa	Ada peningkatan 27,58% jumlah desa dengan IDM Desa Maju dan diantara peningkatan tersebut terdapat 9 Desa desa dengan IDM Desa Maju

Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibuat dalam rangka mewujudkan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung pada misi ke-1 *Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat Yang Berkeadilan* untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui strategi meningkatkan partisipasi masyarakat.



Gambar 7: Penyerahan Piagam dan Lencana Desa Mandiri dari Menteri Desa PDTT RI di sampaikan oleh Bupati Belitung kepada 9 Desa Mandiri di Kabupaten Belitung Tahun 2022

Hal-hal tersebut oleh PD DPPKBPM diupayakan pencapaiannya melalui indikator kinerja: Jumlah desa dengan IDM Desa Maju yang targetnya pada tahun 2022 adalah berjumlah 31 Desa dengan IDM Desa Maju dengan indikator kinerja: Persentase peningkatan jumlah Desa Maju dengan target 12%. Jika dilihat perbandingan untuk setiap indikator kinerja selama tahun Renstra berjalan adalah sebagai berikut:



Laporan Rekapitulasi Indeks Desa Membangun, Pada Tahun 2022 target Desa dengan IDM Desa Maju sebanyak 31 Desa, dari hasil pendataan IDM Tahun 2022 diperoleh hasil sebanyak 28 Desa Maju dan 9 Desa Mandiri di Kabupaten Belitung. Sehingga Pada tahun 2022 Status Desa Maju di Kabupaten Belitung bertambah menjadi 28 Desa Maju dan 9 Desa Mandiri. Ada banyak hal yang jadi faktor pendorong peningkatan Status Desa Maju dan Desa Mandiri diantaranya adalah potensi desa terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam kebanyakan berada di sektor agraris. Sedangkan sumber daya manusia mencakup kualitas pendidikan masyarakat dan aparat pemerintah desa. Selain itu, potensi di sektor pariwisata terkadang dapat menunjang kemajuan desa.

Ketajaman prioritas, inovasi kegiatan dan kualitas perencanaan desa akan menentukan secara signifikan kecepatan perkembangan desa. Kuatnya dukungan kapasitas pemerintah desa yang memadai serta partisipasi masyarakat yang tinggi dan sinergi kelembagaan desa juga menjadi faktor pendorong yang penting untuk peningkatan status desa ini. Kemampuan pemerintah desa dengan kewenangan desa serta keuangan desa yang mampu berkolaborasi atau kerja sama dengan kelembagaan desa serta dukungan partisipasi masyarakat untuk dapat mengelola potensi desanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.

Perkembangan kemandirian desa terpotret dari Indeks Desa Membangun yang mengarah pada ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, terdiri dari :

1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang terdiri dari :
 - a. Dimensi Modal Sosial (Indikator Solidaritas Sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan sosial);
 - b. Dimensi Kesehatan (Indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
 - c. Dimensi Pendidikan (Indikator akses ke pendidikan dasar, menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan
 - d. Dimensi Pemukiman (Indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunitas).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang terdiri dari Dimensi Ekonomi (Indikator Keragaman produksi masyarakat desa, tersedianya pusat pelayanan

perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga Ekonomi dan keterbukaan wilayah).

3. Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKE) terdiri dari Dimensi Ekologi (Indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Dari data pada grafik yang disajikan dapat disimpulkan bahwa capaian untuk indikator tujuan/sasaran "Jumlah desa dengan IDM Desa Maju" pada tahun 2022 mengalami peningkatan status desa menjadi 37 Desa yang terdiri dari Desa dengan IDM Desa Maju menjadi 28 desa dan desa yang mengalami peningkatan menjadi Desa dengan IDM Desa Mandiri sebanyak 9 Desa di Kabupaten Belitung. Sehingga mengalami peningkatan 8,88%. Dilihat perbandingannya dengan capaian tahun 2022 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah 112,12%. Dan Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, maka ada peningkatan 27,58% jumlah desa dengan IDM Desa Maju dan diantara peningkatan tersebut terdapat 9 Desa desa dengan IDM Desa Maju.

Berikut adalah rekapitulasi desa dengan status IDM Desa Maju di Kabupaten Belitung Tahun 2022

Tabel 3.23

Capaian Peningkatan Desa dengan IDM Desa Maju Kabupaten Belitung 2018-2022

No.	Kecamatan	Desa	Capaian Tahun 2018		Capaian Tahun 2019		Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022	
			Nilai IDM	Status Perkembangan Desa	Nilai IDM	Status Perkembangan Desa	Nilai IDM	Status Perkembangan Desa	Nilai IDM	Status Perkembangan Desa	Nilai IDM	Status Perkembangan Desa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Tanjung Pandan	Aik Ketekok	0.6794	Berkembang	0.7284	Maju	0.7151	Maju	0.7151	Maju	0.7770	Maju
		Aik Pelempang Jaya	0.6184	Berkembang	0.6411	Berkembang	0.6786	Berkembang	0.6786	Berkembang	0.7141	Maju
		Aik Rayak	0.7078	Maju	0.7508	Maju	0.7508	Maju	0.7508	Maju	0.8217	Mandiri
		Air Merbau	0.7513	Maju	0.7335	Maju	0.7316	Maju	0.7316	Maju	0.7713	Maju
		Air Saga	0.7226	Maju	0.7471	Maju	0.7281	Maju	0.7117	Maju	0.7527	Maju
		Buluh Tumbang	0.6984	Berkembang	0.7188	Maju	0.7225	Maju	0.7146	Maju	0.7335	Maju
		Dukong	0.6851	Berkembang	0.7057	Berkembang	0.7000	Maju	0.6868	Berkembang	0.7022	Berkembang
		Juru Seberang	0.6737	Berkembang	0.6645	Berkembang	0.6810	Berkembang	0.6733	Berkembang	0.6789	Berkembang
		Perawas	0.6741	Berkembang	0.6667	Berkembang	0.7116	Maju	0.7116	Maju	0.7921	Maju
2	Membalong	Bantan	0.6867	Berkembang	0.6776	Berkembang	0.6849	Berkembang	0.6849	Berkembang	0.7262	Maju
		Gunung Riting	0.6027	Berkembang	0.7078	Maju	0.7148	Maju	0.7257	Maju	0.8116	Maju
		Kembiri	0.6179	Berkembang	0.6829	Berkembang	0.6797	Berkembang	0.7538	Maju	0.7851	Maju
		Lassar	0.6121	Berkembang	0.6305	Berkembang	0.6108	Berkembang	0.6108	Berkembang	0.7427	Maju
		Membalong	0.7372	Maju	0.8079	Maju	0.7914	Maju	0.7914	Maju	0.8356	Mandiri
		Mentigi	0.6059	Berkembang	0.6222	Berkembang	0.6051	Berkembang	0.6051	Berkembang	0.7222	Maju
		Padang kandis	0.6718	Berkembang	0.6667	Berkembang	0.7887	Maju	0.7887	Maju	0.8356	Mandiri
		Perpat	0.6489	Berkembang	0.6841	Berkembang	0.7332	Maju	0.7332	Maju	0.7465	Maju
		Pulau Seliu	0.6914	Berkembang	0.7168	Maju	0.7813	Maju	0.7998	Maju	0.8186	Mandiri
		Pulau Sumedang	0.5422	Tertinggal	0.6802	Berkembang	0.6687	Berkembang	0.6687	Berkembang	0.6829	Berkembang
		Simpang Rusa	0.7019	Berkembang	0.7127	Maju	0.7375	Maju	0.7430	Maju	0.7321	Maju
Tanjung Rusa	0.6535	Berkembang	0.6667	Berkembang	0.7014	Berkembang	0.7090	Maju	0.8340	Mandiri		
3	Badau	Air Batu Buding	0.7427	Maju	0.7426	Maju	0.7406	Maju	0.7635	Maju	0.7748	Maju
		Badau	0.6700	Berkembang	0.6241	Berkembang	0.6165	Berkembang	0.7449	Maju	0.8252	Mandiri
		Cerucuk	0.6333	Berkembang	0.6722	Berkembang	0.6852	Berkembang	0.7116	Maju	0.7176	Maju
		Ibul	0.6752	Berkembang	0.7016	Berkembang	0.6794	Berkembang	0.6946	Berkembang	0.7210	Maju
		Kacang Butor	0.6406	Berkembang	0.6988	Berkembang	0.6816	Berkembang	0.7154	Maju	0.7263	Maju
		Pegantungan	0.6125	Berkembang	0.7021	Berkembang	0.6405	Berkembang	0.6741	Berkembang	0.6706	Berkembang
		Sungai Samak	0.6701	Berkembang	0.7394	Maju	0.7078	Maju	0.7230	Maju	0.8516	Mandiri
4	Sijuk	Air Selumar	0.6329	Berkembang	0.7119	Maju	0.7135	Maju	0.7116	Maju	0.7340	Maju
		Air Seruk	0.7429	Maju	0.7452	Maju	0.7283	Maju	0.7283	Maju	0.8024	Maju
		Batu Itam	0.7349	Maju	0.7467	Maju	0.7543	Maju	0.7543	Maju	0.7805	Maju
		Keciput	0.6826	Berkembang	0.7168	Maju	0.7359	Maju	0.7359	Maju	0.7600	Maju
		Pelepak Pute	0.6549	Berkembang	0.6795	Berkembang	0.6833	Berkembang	0.6667	Berkembang	0.7317	Maju

		Sijuk	0.7745	Maju	0.7107	Maju	0.7424	Maju	0.7710	Maju	0.8802	Mandiri
		Sungai Padang	0.7421	Maju	0.7275	Maju	0.7421	Maju	0.7532	Maju	0.7627	Maju
		Tanjong Tinggi	0.6438	Berkembang	0.6737	Berkembang	0.6362	Berkembang	0.6530	Berkembang	0.7183	Maju
		Tanjong Binga	0.7290	Maju	0.7302	Maju	0.7317	Maju	0.7375	Maju	0.7654	Maju
		Terong	0.6171	Berkembang	0.6975	Berkembang	0.7349	Maju	0.7368	Maju	0.7610	Maju
5	Selat Nasik	Petaling	0.6419	Berkembang	0.6438	Berkembang	0.6495	Berkembang	0.6590	Berkembang	0.7902	Maju
		Pulau Gersik	0.6045	Berkembang	0.6124	Berkembang	0.6162	Berkembang	0.6200	Berkembang	0.6352	Maju
		Selat Nasik	0.6756	Berkembang	0.7041	Berkembang	0.7060	Berkembang	0.7098	Maju	0.8049	Maju
		Suak Gual	0.6659	Berkembang	0.7179	Maju	0.7271	Maju	0.7348	Maju	0.8206	Mandiri

Pada tiwulan ke 2 tahun 2022 ada sejumlah 9 (sembilan) Desa di Kabupaten Belitung meningkat menjadi Desa dengan status IDM Desa Mandiri. Sehingga dengan adanya peralihan atau peningkatan status ini mengakibatkan berkurangnya jumlah desa dengan IDM Desa Maju di Kabupaten Belitung sebagai berikut :

Tabel 3.24

Status Perkembangan Desa Di Kabupaten Belitung Tahun 2022

No	Status Desa	Jumlah Desa
1	Desa Mandiri	9
2	Desa Maju	28
3	Desa Berkembang	5
4	Desa Tertinggal	0
5	Desa Sangat Tertinggal	0
JUMLAH		42

Berikut adalah daftar desa dengan status IDM Desa Maju di Kabupaten Belitung Tahun 2022

Tabel 3.25

Daftar IDM Desa Mandiri di Kab. Belitung Tahun 2022

NO	NAMA DESA	STATUS IDM TAHUN 2022
1	Air Rayak	MANDIRI
2	Membalong	MANDIRI
3	Tanjung Rusa	MANDIRI
4	Pulau Seliu	MANDIRI
5	Padang Kandis	MANDIRI
6	Suak Gual	MANDIRI
7	Sijuk	MANDIRI
8	Badau	MANDIRI
9	Sungai Samak	MANDIRI

Sasaran 4 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rata-Rata hasil capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23

Capaian indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	%	12	27,58	229,83%
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran					229,83%

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada table berikut:

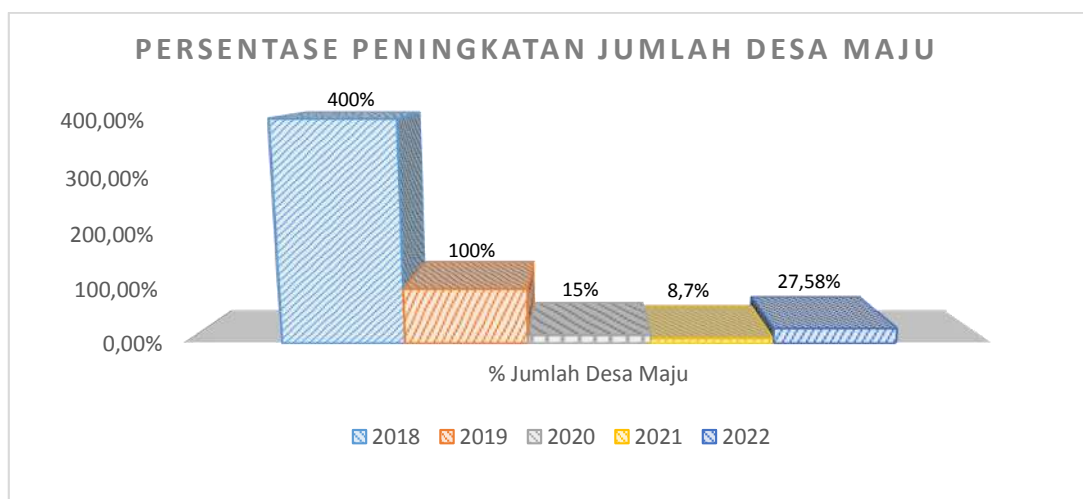
Tabel 3.24

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2021	2022		
1	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	%	8,7	27,58	18,88	Jika jumlah Desa di Kab. Belitung berjumlah 42 Desa, maka total persentase peningkatan jumlah Desa Maju sampai dengan 2022 adalah sebesar 18,88% dengan kenaikan 10,18% pada tahun 2022.

Analisa pencapaian indikator kinerjanya sasaran 4 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Persentase peningkatan jumlah Desa Maju



Capaian indikator "Persentase peningkatan jumlah Desa Maju" pada tahun 2022 persentase mengalami peningkatannya sebesar 27,58% dan jika dibandingkan capaian tahun 2022 terhadap total target akhir Renstra PD DPPKBPM Kabupaten Belitung tahun 2023 sebesar 10,7% telah mencapai 157,76% dari target akhir Renstra.

Dari pengukuran kinerja sasaran strategis 3 **Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** dan Sasaran Strategis 4 **Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Capaian rata Kinerja Tahun 2022 dari 2 (dua) indikator kinerja melampaui target yang ditetapkan atau pencapaiannya 174,60% dan termasuk katagori Sangat Tinggi.
2. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 untuk 2 (dua) indikator kinerja ini pada tahun 2022 mengalami peningkatan realisasi yang sangat tinggi. Jumlah desa dengan IDM Desa Maju pada tahun 2022 bertambah 8 Desa dibanding

kondisi tahun 2021. Dan persentase peningkatan jumlah Desa Maju sampai dengan tahun 2022 meningkat 27,58% dari kondisi tahun 2021.

3. Peningkatan status IDM desa sebesar 27,58% pada tahun 2022 tersebut didalamnya terdiri dari 28 Desa dengan IDM Desa Maju dan 9 Desa Dengan IDM desa Mandiri. Jika jumlah Desa di Kab. Belitung berjumlah 42 Desa, maka total persentase peningkatan jumlah Desa Mandiri sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 21,42%.
4. Dibanding dengan target akhir Renstra tahun 2023, realisasi tahun 2021 dari 2 (dua) indikator masing-masing sudah mencapai 257,76% dari target yang ditetapkan.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi untuk mengimplementasikan perubahan peraturan.
2. Perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam memberikan pemikiran atau ide-ide dan masukkan dalam forum perencanaan pembangunan Desa.

Untuk mengupayakan pencapaian sasaran strategis 3 dan 4 PD DPPKBPM Kab. Belitung melaksanakan program-program, yaitu:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pencapaian indikator kinerja program-program tersebut pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25

Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pengisian Profil Desa/Kelurahan yang Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku)	100	100	100	
	Persentase Pengelolaan Keuangan desa Sesuai dengan peraturan yang berlaku	100	100	100	
	Persentase BUMDesa aktif	100	100	100	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Desa Aktif	95	100	105,26	

Analisa penyebab keberhasilan dan hambatan pencapaian indikator kinerja program

1. **Persentase Pengisian Profil Desa/Kelurahan yang Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku**, pada tahun 2022 capaian kinerja indikator ini sebesar 100 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 100 % faktor pendorong tercapai indikator kinerja program ini adalah:

- Terbitnya Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, pasal 30 menyebutkan perlombaan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan pada hasil penilaian dan pemeringkatan serta tambahan syarat.
- Memiliki profil desa 2 tahun terakhir.

- Memiliki peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa
- Tersedianya anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala ke desa
- Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa



Gambar 8 : Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ketua dan anggota BPD serta ketua RT/RW pada Pemerintah Desa di Kabupaten Belitung.

Hal-hal yang menjadi faktor penghambat pencapaian indikator kinerja adalah:

1. Pemahaman terkait data dasar keluarga, potensi desa kelurahan dan tingkat perkembangan desa/kelurahan yang belum optimal dari operator profil desa/ kelurahan serta pokja profil desa/ Kelurahan
2. Sering terjadinya Penggantian operator operator profil desa/ kelurahan serta pokja profil desa/ Kelurahan
3. Kurangnya fasilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan

2. Persentase Pengelolaan Keuangan desa Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada tahun 2022 capaian kinerja indikator ini sebesar 100 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 100 %. Hal yang menjadi faktor pendorong tercapai indikator kinerja program ini adalah:

1. Ketersediaan Anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
2. Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa

Hal-hal yang menjadi faktor penghambat pencapaian indikator kinerja adalah:

1. Kurang memadai sumber daya manusia dan kapasitas aparatur yang membidangi masalah keuangan di desa sering berganti-ganti
2. keterlambatan penetapan regulasi dari pusat (terutama regulasi yang menyangkut perencanaan di desa)
3. Peraturan yang selalu berubah-ubah
4. Kurangnya fasilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan

3. Persentase BUMDesa aktif tahun 2022, pada tahun 2022 capaian kinerja



Gambar 9 : Pembinaan BUMDesa di Desa Air Ketekok

indikator ini adalah sebesar 100% atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100 % persen. Hal yang menjadi faktor pendorong tercapai indikator kinerja program ini adalah:

1. Ketersediaan Anggaran untuk melaksanakan kegiatan
2. Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa

Hal-hal yang menjadi faktor penghambat pencapaian indikator kinerja adalah:

1. Kurangnya kemampuan pengurus BUMDesa dalam mengelola unit usaha BUMDesa.
2. Belum memadainya insentif bagi pengurus BUMDesa sehingga sering terjadi pergantian pengurus
3. Belum tersusunnya standar laporan keuangan BUMDesa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
4. Kurangnya fasilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan

- 4. Persentase Kelembagaan Desa Aktif**, pada tahun 2022 capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100% atau sebesar 105,26% dari target yang ditetapkan sebesar 95 % persen.

Hal yang menjadi faktor pendorong tercapai indikator kinerja program ini adalah:

1. adanya Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa.
2. Ketersediaan Anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
3. Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa

Hal-hal yang menjadi faktor penghambat pencapaian indikator kinerja adalah:

1. Kurang memadai sumber daya manusia dan kapasitas aparatur yang membidangi masalah keuangan di desa sering berganti-ganti
2. keterlambatan penetapan regulasi dari pusat (terutama regulasi yang menyangkut perencanaan di desa)
3. Peraturan yang selalu berubah-ubah
4. Kurangnya fasilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan

Indikator target yang ditetapkan adalah meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dan telah dituangkan dalam Laporan kegiatan tahunan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat termasuk juga Lembaga Adat Melayu Belitung dan Laporan kegiatan tahunan tim penggerak PKK

Kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja program tersebut adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengamankan, memelihara dan memanfaatkan hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa solusi yang dilakukan adalah perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam memberikan pemikiran/ide-ide dan masukan dalam forum perencanaan pembangunan Desa

Untuk mendukung tercapainya target kinerja sasaran 3-4 diupayakan melalui program-program sebagai pendukung pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan untuk mendukung tercapainya target kinerja program yang telah ditetapkan masing-masing program mengupayakannya melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sebagai berikut:

Tabel 3.26

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Persentase Pengisian Profil Desa/Kelurahan		

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		yang Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku		
		2. Persentase Pengelolaan Keuangan desa Sesuai dengan Aturan Yang Berlaku		
		3. Persentase BUMDesa Aktif Tiap Desa		
	Anggaran		1.041.554.931	2.009.712.731
	Realisasi		851.829.589	1.822.521.351
	%		81,78	90,69
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Output</i> : Laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa <i>Outcome</i> : Administrasi pemerintahan desa yang sesuai regulasi		
	Anggaran		1.041.554.931	2.009.712.731
	Realisasi		851.829.589	1.822.521.351
	%		81,78	90,69
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	- Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - Laporan BPJS Kesehatan - Laporan Hasil Pembinaan atas regulasi baru		
	Anggaran		729.674.831	742.507.591
	Realisasi		644.571.789	732.971.795
	%		88,34	98,72
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa		
	Anggaran		113.254.575	63.391.400
	Realisasi		76.956.325	51.523.310
	%		67,95	81,28
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa - Laporan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		
	Anggaran		32.533.875	49.218.500
	Realisasi		32.145.805	48.959.100
	%		98,81	99,47
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	- Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		
	Anggaran		-	1.026.758.240
	Realisasi		-	889.816.442
	%		-	86,66
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
	Anggaran		90.643.450	127.837.000
	Realisasi		58.262.520	99.250.704
	%		64,28	77,64
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	Persentase Kelembagaan Desa Aktif		

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			
	Anggaran		483.588.510	479.902.450
	Realisasi		451.316.315	470.537.158
	%		93,33	98,05
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Kabupaten/Kota	<i>Output</i> : Laporan kegiatan tahunan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat <i>Outcome</i> : Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat		
	Anggaran		483.588.510	479.902.450
	Realisasi		451.316.315	470.537.158
	%		93,33	98,05
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
	Anggaran		202.920.760	155.891.000
	Realisasi		177.237.316	152.174.463
	%		87,34	97,62
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya		
	Anggaran		-	44.011.450
	Realisasi		-	42.822.050
	%		-	97,30
	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
	Anggaran		280.667.750	280.000.000
	Realisasi		274.078.999	275.540.645
	%		97,65	98,41
TOTAL ANGGARAN				
	Anggaran		1.525.143.441	2.489.615.181
	Realisasi		1.303.145.904	2.293.058.509
	%		85,44	92,10

- Program Administrasi Pemerintahan Desa** pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan dengan Alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 2.009.712.731,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.822.521.351,- setara dengan 90,69% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. *Output* dari kegiatan ini adalah berupa laporan

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan *outcome* kegiatan adalah administrasi pemerintahan desa yang sesuai regulasi

Faktor Pendorong tercapainya kinerja adalah:

- Ketersediaan data realisasi keuangan desa,
- Pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa secara berkala,

Faktor Penghambat capaian kinerja adalah

- Regulasi yang berubah – ubah sehingga mengharuskan dilakukan penyesuaian Perbup atau perda
- keterlambatan penetapan regulasi dari pusat (terutama regulasi yang menyangkut perencanaan di desa
- Kurangnya fasilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.009.712.731,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.822.521.351,- atau 90.69% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah

Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran kas yang telah dibuat.

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa

Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan adalah:

- Ketersediaan data realisasi keuangan desa,
- Pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa secara berkala,

Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran sub kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta Mengikuti jadwal anggaran Kas yang telah dibuat

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan adalah

- Dukungan data dan informasi perangkat daerah opd tehnik terkait,
- Koordinasi yang baik dengan lembaga legislative

Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran sub kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat.

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Faktor pendorong capaian sub kinerja kegiatan adalah:

- Partisipasi aktif pelaksana Operasional BUMDesa dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan baik pembinaan maupun monitoring dan Evaluasi.
- Tersedianya regulasi terkait BUMDesa yaitu PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menerangkan lebih rinci tentang penyusunan laporan Pertanggung jawaban keuangan BUMDesa

Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat dan faktor penghambat capaian kinerja kegiatan adalah:

- Kurangnya kemampuan pengurus BUMDesa dalam mengelola unit usaha BUMDesa.
- Belum memadainya insentif bagi pengurus BUMDesa sehingga sering terjadi pergantian pengurus

- Belum tersusunnya standar laporan keuangan BUMDesa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
- Kurangnya fasilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat dan faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah:

- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait,
- Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pilkades

Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat dan faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah:

- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait,
- Partisipasi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan lomba desa

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota. *Output* dari kegiatan ini adalah laporan kegiatan tahunan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Sedangkan *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat

Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat, dan faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah:

- Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada belum memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai kelembagaan desa.
- Kurang optimalnya kerja sama dan koordinasi antar kelembagaan desa
- Belum optimalnya koordinasi lintas sector antara stakeholder dalam melakukan intervensi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 479.902.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 470.537.158,- atau 98.05% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat, dan faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah

- Faktor pendorong Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan Stakeholder dan OPD terkait,
- Terbitnya perda nomor 4 Tahun 2011 tentang Lembaga Adat Melayu Belitung

Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran sub kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat dan faktor pendorong capaian kinerja adalah

- Tersedianya dukungan anggaran dari pemerintah Desa untuk kegiatan Kelembagaan Pokjanel Posyandu,
- Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan stakeholder dan OPD terkait

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2022, untuk Tahun 2022 Pagu Alokasi Dana Desa adalah sebesar Rp. 54.902.400.000 (Lima puluh empat milyar Sembilan ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang di bagi dengan perhitungan 90% Alokasi dasar yang di bagi secara merata kepada 42 desa dan 10% formula dibagi secara proposional berdasarkan bobot desa dari kriteria/variable dengan bobot jumlah penduduk 30%, jumlah penduduk miskin 50% dan luas wilayah 20% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.27

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2022

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa (Pembuatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	1.176.480.000	152.214.089	1.328.694.089	1.328.694.000
2	Perawas	1.176.480.000	164.293.058	1.340.773.058	1.340.773.000
3	Dukong	1.176.480.000	210.826.952	1.387.306.952	1.387.307.000
4	Juru Seberang	1.176.480.000	110.387.015	1.286.867.015	1.286.867.000
5	Air Saga	1.176.480.000	326.926.073	1.503.406.073	1.503.406.000
6	Air Merbau	1.176.480.000	212.021.737	1.388.501.737	1.388.502.000
7	Aik Pelempang Jaya	1.176.480.000	193.849.316	1.370.329.316	1.370.329.000
8	Aik Ketekok	1.176.480.000	141.907.649	1.318.387.649	1.318.388.000
9	Aik Rayak	1.176.480.000	255.075.432	1.431.555.432	1.431.555.000
10	Membalong	1.176.480.000	201.000.007	1.377.480.007	1.377.480.000
11	Perpat	1.176.480.000	103.854.763	1.280.334.763	1.280.335.000
12	Lassar	1.176.480.000	155.097.641	1.331.577.641	1.331.578.000
13	Simpang Rusa	1.176.480.000	153.375.376	1.329.855.376	1.329.855.000
14	Kembiri	1.176.480.000	150.346.184	1.326.826.184	1.326.826.000
15	Bantan	1.176.480.000	164.915.566	1.341.395.566	1.341.396.000
16	Tanjungrusa	1.176.480.000	93.181.780	1.269.661.780	1.269.662.000
17	Mentigi	1.176.480.000	73.111.175	1.249.591.175	1.249.591.000
18	Pulau Seliu	1.176.480.000	36.633.416	1.213.113.416	1.213.113.000
19	Pulau Sumedang	1.176.480.000	20.568.672	1.197.048.672	1.197.049.000
20	Gunung Riting	1.176.480.000	58.808.985	1.235.288.985	1.235.289.000
21	Padang Kandis	1.176.480.000	69.908.520	1.246.388.520	1.246.389.000
22	Selat Nasik	1.176.480.000	124.323.669	1.300.803.669	1.300.804.000
23	Petaling	1.176.480.000	44.938.291	1.221.418.291	1.221.418.000
24	Suak Gual	1.176.480.000	49.406.000	1.225.886.000	1.225.886.000
25	Pulau Gersik	1.176.480.000	99.249.238	1.275.729.238	1.275.729.000
26	Sijuk	1.176.480.000	116.279.994	1.292.759.994	1.292.760.000

27	Batu Itam	1.176.480.000	89.219.823	1.265.699.823	1.265.700.000
28	Terong	1.176.480.000	167.058.692	1.343.538.692	1.343.539.000
29	Air Seruk	1.176.480.000	208.893.349	1.385.373.349	1.385.373.000
30	Tanjung Binga	1.176.480.000	223.875.314	1.400.355.314	1.400.355.000
31	Air Selumar	1.176.480.000	149.122.240	1.325.602.240	1.325.602.000
32	Sungai Padang	1.176.480.000	120.290.497	1.296.770.497	1.296.770.000
33	Keciput	1.176.480.000	117.170.775	1.293.650.775	1.293.651.000
34	Pelepak Pute	1.176.480.000	96.500.545	1.272.980.545	1.272.981.000
35	Tanjong Tinggi	1.176.480.000	64.807.166	1.241.287.166	1.241.287.000
36	Badau	1.176.480.000	148.444.251	1.324.924.251	1.324.924.000
37	Air Batu Buding	1.176.480.000	104.404.316	1.280.884.316	1.280.884.000
38	Sungai Samak	1.176.480.000	102.805.123	1.279.285.123	1.279.285.000
39	Kacang Butor	1.176.480.000	135.412.952	1.311.892.952	1.311.893.000
40	Cerucuk	1.176.480.000	101.089.639	1.277.569.639	1.277.570.000
41	Pegantungan	1.176.480.000	102.449.707	1.278.929.707	1.278.930.000
42	Ibul	1.176.480.000	76.195.013	1.252.675.013	1.252.675.000
TOTAL		49.412.160.000	5.490.240.000	54.902.400.000	54.902.400.000

Adapun Peraturan Bupati Belitung tentang Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2022 tidak menjadi syarat penyaluran sehingga Rincian perhitungan masing-masing Desa mengacu kepada PMK Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, akan tetapi hal tersebut tidak menghambat komitmen pemerintah Kabupaten Belitung dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan untuk Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung untuk Tahun 2022 **berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 46 Tahun 2022 tentang** Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2022. Pagu Alokasi besaran bagi hasil pajak adalah Rp.8.074.534.000,00 (*delapan milyar tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah*). Dan Alokasi Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa adalah sebesar Rp.921.234.000,00 (*sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah*). Presentase dan besarnya pembagian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 adalah 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa, dan 40% (empat per seratus) dibagi secara proposional berdasarkan capaian target dan realisasi dibagi total Pajak Bumi dan Bangunan diwilayah masing-masing desa dan jumlah penduduk Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.28

**PENETAPAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELITUNG KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa (Pembuatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	115.350.486	72.665.653	188.016.139	188.016.000
2	Perawas	115.350.486	85.480.590	200.831.076	200.831.000
3	Dukong	115.350.486	90.122.182	205.472.668	205.473.000
4	Juru Seberang	115.350.486	59.081.330	174.431.816	174.432.000

5	Air Saga	115.350.486	142.608.682	257.959.168	257.959.000
6	Air Merbau	115.350.486	107.112.140	222.462.626	222.463.000
7	Aik Pelempang Jaya	115.350.486	99.616.443	214.966.929	214.967.000
8	Aik Ketekok	115.350.486	96.019.274	211.369.760	211.370.000
9	Aik Rayak	115.350.486	130.939.657	246.287.143	246.287.000
10	Membalong	115.350.486	101.745.086	217.095.572	217.096.000
11	Perpat	115.350.486	78.734.421	194.084.907	194.085.000
12	Lassar	115.350.486	86.123.562	201.474.048	201.474.000
13	Simpang Rusa	115.350.486	85.902.492	201.252.978	201.253.000
14	Kembiri	115.350.486	91.968.048	207.318.534	207.318.000
15	Bantan	115.350.486	80.671.352	196.021.838	196.022.000
16	Tanjungrusa	115.350.486	84.888.841	200.239.327	200.239.000
17	Mentigi	115.350.486	56.269.330	171.619.816	171.620.000
18	Pulau Seliu	115.350.486	53.267.233	168.617.719	168.618.000
19	Pulau Sumedang	115.350.486	68.755.224	184.105.710	184.106.000
20	Gunung Riting	115.350.486	74.754.186	190.104.672	190.105.000
21	Padang Kandis	115.350.486	50.019.853	165.370.339	165.370.000
22	Selat Nasik	115.350.486	46.504.374	161.854.860	161.855.000
23	Petaling	115.350.486	62.683.456	178.033.942	178.034.000
24	Suak Gual	115.350.486	54.450.982	169.801.468	169.801.000
25	Pulau Gersik	115.350.486	72.847.647	188.198.133	188.198.000
26	Sijuk	115.350.486	76.924.903	192.275.389	192.275.000
27	Batu Itam	115.350.486	57.400.274	172.750.760	172.751.000
28	Terong	115.350.486	60.838.334	176.188.820	176.189.000
29	Air Seruk	115.350.486	96.818.086	212.168.572	212.168.000
30	Tanjung Binga	115.350.486	112.898.551	228.249.037	228.249.000
31	Air Selumar	115.350.486	77.038.998	192.389.484	192.389.000
32	Sungai Padang	115.350.486	63.999.139	179.349.625	179.350.000
33	Keciput	115.350.486	62.897.007	178.247.493	178.247.000
34	Pelepak Pute	115.350.486	73.253.656	188.604.142	188.604.000
35	Tanjong Tinggi	115.350.474	25.714.343	141.064.817	141.065.000
36	Badau	115.350.486	78.228.197	193.578.683	193.579.000
37	Air Batu Buding	115.350.486	78.310.283	193.660.769	193.661.000
38	Sungai Samak	115.350.486	62.164.679	177.515.165	177.515.000
39	Kacang Butor	115.350.486	68.851.373	184.201.859	184.202.000
40	Cerucuk	115.350.486	71.449.550	186.800.036	186.800.000
41	Pegantungan	115.350.486	64.955.461	180.305.947	180.306.000
42	Ibul	115.350.486	64.841.728	180.192.214	180.192.000
TOTAL		4.844.720.400	3.229.813.600	8.074.534.000	8.074.534.000

Tabel 3.29

**PENETAPAN ALOKASI BAGIAN DARI RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BELITUNG KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa (Pembuatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	13.160.486	10.801.903	23.962.389	23.962.000
2	Perawas	13.160.486	13.114.484	26.274.970	26.275.000
3	Dukong	13.160.486	16.067.058	29.227.544	29.228.000
4	Juru Seberang	13.160.486	6.918.919	20.079.405	20.079.000
5	Air Saga	13.160.486	30.741.189	43.901.675	43.902.000

6	Air Merbau	13.160.486	20.764.823	33.925.309	33.925.000
7	Aik Pelempang Jaya	13.160.486	17.607.882	30.768.368	30.768.000
8	Aik Ketekok	13.160.486	14.418.672	27.579.158	27.579.000
9	Aik Rayak	13.160.486	26.056.869	39.217.355	39.217.000
10	Membalong	13.160.486	12.990.788	26.151.274	26.151.000
11	Perpat	13.160.486	5.028.518	18.189.004	18.189.000
12	Lassar	13.160.486	8.927.637	22.088.123	22.088.000
13	Simpang Rusa	13.160.486	7.954.202	21.114.688	21.115.000
14	Kembiri	13.160.486	7.585.803	20.746.289	20.746.000
15	Bantan	13.160.486	7.397.569	20.558.055	20.558.000
16	Tanjungrusa	13.160.486	5.558.261	18.718.747	18.719.000
17	Mentigi	13.160.486	3.872.228	17.032.714	17.033.000
18	Pulau Seliu	13.160.486	2.853.079	16.013.565	16.014.000
19	Pulau Sumedang	13.160.486	1.374.103	14.534.589	14.535.000
20	Gunung Riting	13.160.486	3.592.567	16.753.053	16.753.000
21	Padang Kandis	13.160.486	3.361.309	16.521.795	16.522.000
22	Selat Nasik	13.160.486	6.152.540	19.313.026	19.313.000
23	Petaling	13.160.486	1.753.259	14.913.745	14.914.000
24	Suak Gual	13.160.486	2.476.613	15.637.099	15.637.000
25	Pulau Gersik	13.160.486	5.569.017	18.729.503	18.730.000
26	Sijuk	13.160.486	8.408.651	21.569.137	21.569.000
27	Batu Itam	13.160.486	6.838.247	19.998.733	19.999.000
28	Terong	13.160.486	7.292.696	20.453.182	20.453.000
29	Air Seruk	13.160.486	15.652.944	28.813.430	28.814.000
30	Tanjung Binga	13.160.486	16.798.479	29.958.965	29.959.000
31	Air Selumar	13.160.486	8.787.807	21.948.293	21.948.000
32	Sungai Padang	13.160.486	6.281.615	19.442.101	19.442.000
33	Keciput	13.160.486	6.846.314	20.006.800	20.007.000
34	Pelepak Pute	13.160.486	5.068.854	18.229.340	18.229.000
35	Tanjong Tinggi	13.160.474	2.957.951	16.118.425	16.118.000
36	Badau	13.160.486	9.352.507	22.512.993	22.513.000
37	Air Batu Buding	13.160.486	3.842.649	17.003.135	17.003.000
38	Sungai Samak	13.160.486	6.257.413	19.417.899	19.418.000
39	Kacang Butor	13.160.486	6.961.944	20.122.430	20.122.000
40	Cerucuk	13.160.486	5.410.363	18.570.849	18.571.000
41	Pegantungan	13.160.486	5.278.600	18.439.086	18.439.000
42	Ibul	13.160.486	3.517.274	16.677.760	16.678.000
TOTAL		552.740.400	368.493.600	921.234.000	921.234.000

Adapun Peraturan Bupati Belitung tentang Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2022 tidak menjadi syarat penyaluran sehingga Rincian perhitungan masing-masing Desa mengacu kepada PMK Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, akan tetapi hal tersebut tidak menghambat komitmen pemerintah Kabupaten Belitung dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Sasaran Penunjang Urusan Pemerintah : Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran 5 merupakan sasaran strategis penunjang urusan pemerintah DPPKBPM Kab. Belitung yang merupakan indikator kinerja sasaran penunjang yang ada dalam dokumen Renstra PD DPPKBPM Kabupaten Belitung, namun tidak menjadi bagian dari dokumen IKU Perangkat Daerah. Hasil capaian

indikator kinerja pada sasaran strategis penunjang urusan pemerintah DPPKBPM Kab. Belitung adalah **Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas** dengan indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	3,28	3,57	108,84%
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran					108,84%

Capaian Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2022 adalah 3.57 dengan nilai konversi mencapai 89.30, sedangkan kinerja unit pelayanan menyandang nilai **Sangat Baik**. Perbandingan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2022i dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2021	2022		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	skala	3,26	3,57	0,31	

Analisis penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja sasaran

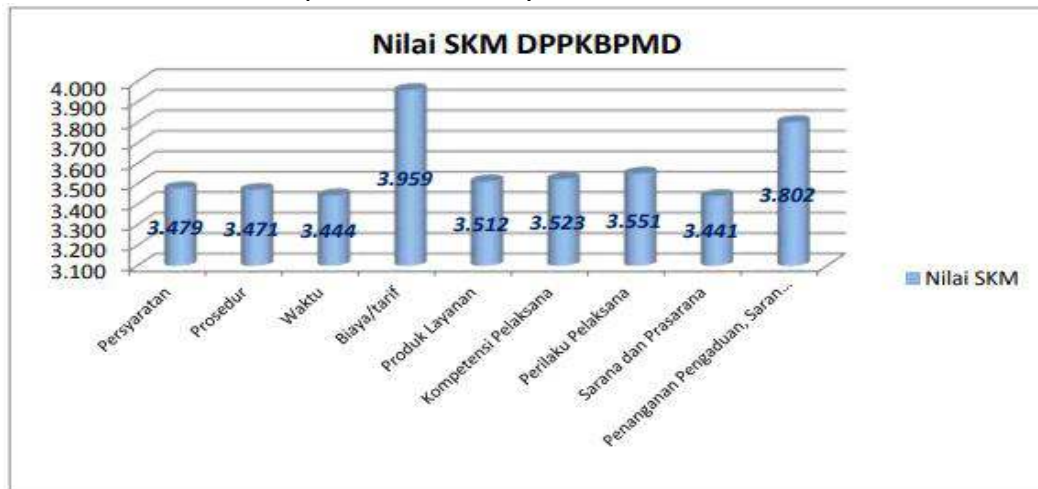
Dari hasil survei didapatkan kesimpulan secara menyeluruh bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung memperoleh nilai 89.30 (Sangat Baik).

Tabel 3.32
Hasil SKM Perbandingan Hasil Survey DPPKBPM Kab. Belitung Tahun 2022

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1.	Persyaratan Pelayanan	3.479	Baik
2.	Prosedur Pelayanan	3.471	Baik
3.	Waktu Pelayanan	3.444	Baik
4.	Biaya/tarif Pelayanan	3.959	Sangat Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.512	Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3.523	Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3.551	Sangat Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3.441	Baik
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.802	Sangat Baik
NILAI SKM		3.57	
NILAI KONVERSI SKM DPPKBPM		89.30	
MUTU PELAYANAN		A	
KINERJA UNIT PELAYANAN		Sangat Baik	

Berdasarkan hasil SKM nilai mutu pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung pada tahun 2022 adalah 3.57 dengan nilai konversi mencapai 89,30, sedangkan kinerja unit pelayanan menyandang nilai Sangat Baik. Nilai tertinggi

di antara ke-9 unsur pelayanan tersebut yaitu : unsur Biaya/tarif Pelayanan dengan tingkat kualitas pelayanan Sangat Baik yaitu 3.959, sedangkan nilai terendah adalah 3.441 pada unsur ke-8 yaitu unsur Sarana dan Prasarana.



Gambar Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bila dibandingkan dengan tahun 2021, penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami kenaikan, yaitu sebesar 7.78 poin atau sebesar 9.54% dengan kinerja keseluruhan Sangat Baik. Semua unsur mengalami kenaikan terutama pada unsur Prosedur Pelayanan (naik 0.39 poin atau 12.73%) dan unsur Persyaratan Pelayanan (naik 0.39 poin atau 12.44%). Ada 3 (tiga) unsur termasuk kategori Sangat Baik yaitu unsur Biaya/tarif Pelayanan, unsur Perilaku Pelaksana dan unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, sedangkan 6 (enam) unsur lainnya termasuk kategori Baik. Kinerja ini menjadi evaluasi terhadap pelayanan yang dilaksanakan di tahun 2022 ini. Unsur-unsur yang sudah Sangat Baik harus di pertahankan dan yang sudah Baik lebih ditingkatkan. Sehingga diharapkan di tahun mendatang adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung.

Maka berdasarkan hasil SKM tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk ditindaklanjuti, yaitu:

- Unsur sarana dan prasarana pelayanan perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan karena dari 48 perangkat daerah yang melakukan SKM, 5 perangkat daerah yang responden memberikan nilai paling rendah untuk unsur sarana dan prasarana pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana harus menjadi perhatian utama, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan di masa mendatang lebih baik lagi dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Dengan perbaikan sarana dan prasarana pada perangkat daerah diharapkan waktu pelayanan juga menjadi lebih cepat sehingga tidak ada lagi antrian panjang menunggu pelayanan. Hal ini perlu dilakukan karena dari 48 perangkat daerah yang melakukan SKM, 2 perangkat daerah yang responden memberikan nilai paling rendah untuk unsur waktu pelayanan.
- Diperlukan juga kejelasan prosedur dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena dari 48 perangkat daerah yang melakukan SKM, 3 perangkat daerah yang responden memberikan nilai paling rendah untuk unsur prosedur pelayanan. Diharapkan semua OPD/UPP dapat

menempatkan banner ataupun diagram alur prosedur setiap pelayan yang disediakan, agar masyarakat jelas dalam menerima informasi alur prosedur dari pelayan yang ingin mereka dapatkan. Diharapkan dengan kejelasan prosedur dapat mempersingkat waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

- d. Memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, whatapp (WA), email atau kotak saran. Di samping itu perlu dibentuk tim reaksi cepat penanganan pengaduan.
- e. Untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada petugas, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah:
 - meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas;
 - memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas; dan
 - menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja
- f. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten.
- g. Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.
- g. Kegiatan penyusunan IKM harus terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan IKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survei dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Untuk mengupayakan pencapaian kinerja sasaran di atas DPPKBPMMD Kab. Belitung melaksanakan melalui **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**, dengan beberapa indikator kinerja program dan pencapaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33

Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	100	100	
	Indeks Profesionalitas ASN	75	76	101,33	
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	100	100	
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur	100	100	100	
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	100	100	

Untuk mendukung pelaksanaan capaian kinerja dilakukan melalui program, yaitu: **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**, pada

tahun anggaran 2022 dilaksanakan dengan alokasi anggaran adalah sebesar Rp.5.522.263.569,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.373.899.500,- setara dengan 97,31%. Alokasi anggaran ini mengalami peningkatan sebesar 2,93% dari alokasi tahun anggaran 2021 yang berjumlah Rp.5.522.263.569,-. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.6 KINERJA LAINNYA TAHUN 2022

1. Penghargaan/ Apresiasi

Tabel 3.34

Penghargaan Yang Diraih Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD Penerima Penghargaan
1.	OPD dengan SAKIP Terbaik (Grade A)	Hasil evaluasi implementasi Sakip Kemenpan RB	DPPKBPMK Kab. Belitung
2.	OPD dengan Prestasi terbanyak Tahun 2022	Skorsing di level Kabupaten, Provinsi dan Nasional	DPPKBPMK Kab. Belitung

3.	Pemenang III Penghargaan Kader IMP Terbaik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 a.n Sri Budiarti – Kader IMP Kecamatan Sijuk	Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPPKBPM Kab. Belitung
4.	Pemenang III Penghargaan PLKB Non PNS Terbaik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 a.n Yunengsih, A.Md.Kep – PLKB Non PNS Kecamatan Sijuk	Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPPKBPM Kab. Belitung
5.	Duta Generasi Berencana (Duta GenRe) Inovator Program Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 a.n Raufi Haqi Mujahidah	Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPPKBPM Kab. Belitung
6.	Duta Generasi Berencana (Duta GenRe) Favorit Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 a.n Aulia Putri	Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPPKBPM Kab. Belitung
7.	Pemenang I PIK Remaja Unggulan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Kelompok PIK R MANSABEL (MAN 1 Belitung)	Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPPKBPM Kab. Belitung
8.	Pemenang II Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Unggulan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – Kelompok BKR Terampil Kelurahan Parit Kecamatan Tanjungpandan	Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPPKBPM Kab. Belitung
9.	Juara Favorit I Lomba Seni Bicara Ayo Cegah Stunting a.n Jihan Aulia Abdullah (Duta GenRe) Kabupaten Belitung Tahun	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	DPPKBPM Kab. Belitung
10.	Pelaksana Terbaik Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Bangsa Kencana Kesehatan Juara III a.n Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPPKBPM Kab. Belitung
11.	Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat Juara III Desa Sijuk Kecamatan Sijuk	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPPKBPM Kab. Belitung
12.	Penghargaan Penyaluran Dana Desa Tercepat untuk 14 Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022	Kemenkeu RI Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPPKBPM Kab. Belitung
13.	Pemenang III Pelaksana Program Bangsa Kencana Kategori OPD KB Kab/Kota Tingkat Provinsi	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPPKBPM Kab. Belitung
14.	Pemenang III Teknologi Tepat Guna Inovasi Pada Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPPKBPM Kab. Belitung
15.	Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta lomba Desa dan Kelurahan di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih juara : Juara II Lomba Desa, Desa Suak Gual Juara III Lomba Kelurahan, Kelurahan Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPPKBPM Kab. Belitung

16.	Pemberian Apresiasi Pelaksana Pemuktahiran PK-22 Verifikasi dan Validasi Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2022	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPPKBPMMD Kab. Belitung
17.	Pemberian Penghargaan Desa Dengan Status Desa Mandiri Tahun 2022	Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi RI	DPPKBPMMD Kab. Belitung

3.7. INOVASI

1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaksanaan Transaksi Non Tunai dan Siskeudes Online

Pada tahun 2022 masih melanjutkan pelaksanaan **Transaksi Non Tunai** di Desa yang telah diluncurkan pada tahun 2021 dan telah dilaksanakan pada semua desa di Kabupaten Belitung yang berjumlah 42 desa. Penerapan Transaksi Non Tunai di Desa di seluruh Kabupaten Belitung didukung oleh Peraturan Bupati Belitung Nomor 51A Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pelaksanaan aplikasi yang dikembangkan oleh Bank Sumbel Babel sebagai Mitra Desa terus meningkatkan implementasi penggunaan aplikasi yang tersedia. Selain itu diupayakan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM perangkat desa yang mendukung dalam penyaluran dan penyimpanan keuangan berbasis internet banking. Penerapan transaksi non tunai diharapkan lebih dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan sumber-sumber pendapatan serta kekayaan desa.

Selain penggunaan sistem Transaksi Non Tunai di Desa, inovasi yang terus ditingkatkan pelaksanaannya pada tahun 2022 adalah lebih meningkatkan Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes di seluruh desa Kabupaten Belitung. **Siskeudes Online** yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa adalah perencanaan yang baik, pelaksanaan yang profesional, penatausahaan yang tertib, pelaporan dan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menggunakan sistem Siskeudes telah diterapkan penggunaan versi aplikasi Siskeudes Online V.2.0.5 menggantikan versi sebelumnya V.2.0.4. Aplikasi terbaru ini diharapkan dapat mempercepat serta mempermudah dalam pelaksanaan program desa mulai dari tingkat perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan sistem yang tersusun secara sistematis. Selain dua hal tersebut dalam hal peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja pemerintahan desa diupayakan peningkatannya melalui penerapan **Sistem aplikasi pengelolaan aset desa (Sipades)** yang berbasis web sehingga memudahkan dalam proses pencatatan inventarisasi penatausahaan dan pelaporan aset Desa, pelaksanaan di kabupaten belitung sudah di mulai sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini terus diupayakan penyempurnaan penggunaannya.

2. Kelas Calon Pengantin (Catin) di Balai Penyuluhan KB

Pelaksanaan Kelas Konseling Catin di Balai Penyuluhan KB merupakan kegiatan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga atau keluarga. Kelas Konseling Catin diisi pemateri dari berbagai unsur diantaranya

Penyuluh KB, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Agama. Adapun materi yang disampaikan adalah pembekalan untuk para catin diantaranya meliputi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, kesiapan dan proses kehamilan, penyakit menular seksual, ketahanan rumah tangga, keluarga sakinah serta stunting dan pola asuh 1000 HPK dan 8 Fungsi Keluarga.



Gambar 9 : Situasi Pelaksanaan Kelas Konseling Catin di Balai Penyuluhan KB Kec. Badau



Gambar 10 :Penyampaian Piagam Penghargaan kepada usia pengantin ideal

3. KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Program Bangga Kencana) melalui media KIE tradisional.

Pelaksanaan KIE dan promosi Program Bangga Kencana yang disesuaikan dengan kearifan lokal budaya khas Belitung yaitu melalui kesenian tradisional Campak Belitung. Seni Campak Belitung adalah seni berbalas pantun yang dalam hal ini dalam bahasa daerah Belitung dengan iringan musik dan gerakan tarian sederhana. Adapun KIE yang dilakukan melalui pantun-pantun berisikan tentang promosi program Bangga Kencana diantaranya perencanaan berkeluarga, penggunaan alat kontrasepsi hingga edukasi tentang stunting.



Gambar: 11: Campak Belitung "Karang Ketipai" pada acara Pencanangan Bulan Bhakti PKK-Bangga Kencana-Kesehatan Tahun 2022



Gambar 12: Campak Belitung sebagai media KIE Tradisional pada kegiatan Pawai Pembangunan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda Kabupaten Belitung 2022



Gambar: 13 : Campak sebagai Media KIE Tradional pada acara Penilaian Bulan Bhakti PKK-Bangga Kencana-Kesehatan Tahun 2022 Di Desa Dukong

3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai PD DPPKBPM Kabupaten Belitung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung sebesar Rp. **11.004.683.700,-** dengan realisasi anggaran mencapai Rp. **9.882.932.598,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **89,81 %**. Komposisi belanja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung untuk tahun 2022, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.35

Komposisi Belanja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi Per 31 Des 2021 (Rp)	Realisasi Per 31 Des 2022 (Rp)	%
Belanja Operasi	10.880.276.700	7.870.226.670	9.769.510.098	89,79
- Belanja Pegawai	4.605.149.578	3.933.082.465	4.545.855.786	98,71
- Belanja Barang Jasa	6.275.127.122	3.937.144.205	5.223.654.312	83,24
Belanja Modal	124.407.000	621.643.400	113.422.500	91,17
Jumlah	11.004.683.700	8.491.870.070	9.882.932.598	89,81

Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) Kabupaten Belitung per 31 Desember tahun anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2022.

Pencapaian target kinerja diukur berdasarkan efektifitas dan efisiensi yang dicapai dan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong seperti tingkat SDM yang cukup termasuk mental, pengawasan intern maupun dari masyarakat yang cukup baik dan perencanaan yang cukup matang. Pencapaian target kinerja keuangan *DPPKBPM Kabupaten Belitung* sebagaimana tersaji pada ikhtisar laporan capai target kinerja keuangan APBD berdasarkan program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.36

Capaian Kinerja Keuangan PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	Lebih Kurang	% Keu
1	2	3	4	5=4-3	6
Pogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5.522.263.569	5.373.899.500	(148.364.069)	97,31
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.866.300	4.823.000	(43.300)	99,11
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.447.500	2.424.700	(22.800)	99,07
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.418.800	2.398.300	(20.500)	99,15
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.607.649.578	4.548.246.986	(59.402.592)	98,71
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.605.149.578	4.545.855.786	(59.293.792)	98,71
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000	2.391.200	(108.800)	95,65
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.929.600	15.570.000	(2.359.600)	86,84
	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4.929.600	2.700.000	(2.229.600)	54,77
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.000.000	12.870.000	(130.000)	99,00
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	380.009.691	370.770.636	(9.239.055)	97,57
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.942.900	9.926.000	(16.900)	99,83
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.858.100	46.808.000	(50.100)	99,89
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	7.995.000	(5.000)	99,94
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.420.350	92.046.160	(7.374.190)	92,58

	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.025.000	62.023.600	(1.400)	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	3.215.000	(1.785.000)	64,30
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.763.341	148.756.876	(6.465)	100,00
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.264.400	-	(8.264.400)	0,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.264.400	-	(8.264.400)	0,00
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.050.000	220.537.278	(21.512.722)	91,11
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.280.000	1.036.000	(244.000)	80,94
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.879.000	53.684.528	(21.194.472)	71,70
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.891.000	165.816.750	(74.250)	99,96
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.494.000	213.951.600	(47.542.400)	81,82
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	138.000.000	90.711.600	(47.288.400)	65,73
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.755.000	39.730.000	(25.000)	99,94
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.739.000	83.510.000	(229.000)	99,73
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.009.712.731	1.822.521.351	(187.191.380)	90,69
8.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.009.712.731	1.822.521.351	(187.191.380)	90,69
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	742.507.591	732.971.795	(9.535.796)	98,72
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	63.391.400	51.523.310	(11.868.090)	81,28
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	49.218.500	48.959.100	(259.400)	99,47
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.026.758.240	889.816.442	(136.941.798)	86,66
	Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	127.837.000	99.250.704	(28.586.296)	77,64
	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	479.902.450	470.537.158	(9.365.292)	98,05
9.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	479.902.450	470.537.158	(9.365.292)	98,05
	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	155.891.000	152.174.463	(3.716.537)	97,62
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	44.011.450	42.822.050	(1.189.400)	97,30
	Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	280.000.000	275.540.645	(4.459.355)	98,41
	Program Pengendalian Penduduk	40.666.000	39.503.014	(1.162.986)	97,14
10.	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	40.666.000	39.503.014	(1.162.986)	97,14
	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal	40.666.000	39.503.014	(1.162.986)	97,14
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	659.417.550	645.537.350	(13.880.200)	97,90
11.	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	112.500.000	112.009.500	(490.500)	99,56

	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	112.500.000	112.009.500	(490.500)	99,56
12.	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	502.540.900	501.334.400	(1.206.500)	99,76
	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	176.400.000	176.400.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Intistusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	326.140.900	324.934.400	(1.206.500)	99,63
13.	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	44.376.650	32.193.450	(12.183.200)	72,55
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	44.376.650	32.193.450	(12.183.200)	72,55
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.292.721.400	1.530.934.225	(761.787.175)	66,77
14.	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	442.625.800	435.483.300	(7.142.500)	98,39
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	369.000.000	362.100.000	(6.900.000)	98,13
	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	73.625.800	73.383.300	(242.500)	99,67
15.	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.850.095.600	1.095.450.925	(754.644.675)	59,21
	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.850.095.600	1.095.450.925	(754.644.675)	59,21
	JUM LAH =	1.004.683.700	9.882.932.598	(1.121.751.102)	89,81

Berdasarkan Pengukuran Perjanjian kinerja dan memperhatikan hasil-hasil perhitungan yang tergambar dalam format Pengukuran Perjanjian Kinerja dapat dijelaskan Realisasi Anggaran Belanja Langsung PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung Tahun 2022 dari Pagu Anggaran Setelah perubahan sebesar Rp. 11.004.683.700,- dengan 6 Program dan 37 Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.882.932.598,- dan Persentase terhadap total Anggaran 89,81% Terkait pagu dan realisasi anggaran dengan pencapaian target tujuan/sasaran strategis dan indikator kinerja pada PD DPPKBPMMD Kab. Belitung pada tahun 2022 lebih rinci dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.37

**Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja DPPKBPM Kab. Belitung
Tahun 2022**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Sasaran 1 Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	4	2.992.804.950	2.215.974.589	74,04
2	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana				
3	Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2.489.615.181	2.293.058.509	92,10
4	Sasaran 4 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
5	Sasaran 5 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	1	5.522.263.569	5.373.899.500	97,31
Jumlah		6	11.004.683.700	9.882.932.598	89,81

Sumber: Data Diolah oleh DPPKBPM

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan PD DPPKBPM Kab. Belitung pada tahun 2022. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Rencana Strategis PD DPPKBPM Kab. Belitung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.38

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Sasaran
DPPKBPM Kab. Belitung Tahun 2022**

No	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Sasaran 1 Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	4	129,98	2.215.974.589	74,04
2	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana				
3	Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	174,59	2.293.058.509	92,10
4	Sasaran 4 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
5	Sasaran 5 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	1	100	5.373.899.500	97,31

3.9 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk tujuan/sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 1 (satu) dari 2 (dua) tujuan/sasaran menunjukkan pencapaian >100% dan 1 (satu) tujuan/sasaran lainnya dengan pencapaian =100%. Tujuan/Sasaran yang

berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.39

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada DPPKBPM Kabupaten Belitung
Tahun 2022**

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1	Sasaran 1 Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	4	129,98	74,04	25,96
2	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana				
3	Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	174,59	92.10	7,90
4	Sasaran 4 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
5	Sasaran 5 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	1	100	97,31	2,69

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi pencapaian **sasaran 1 dan 2** adalah 25,96%. Efisiensi **Sasaran 3 dan 4** terhadap anggaran adalah sebesar 7,90% dan efisiensi **Sasaran 5** terhadap anggaran adalah sebesar 2,69%

BAB IV PENUTUP

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan

Pada tahun 2022 PD DPPKBPMMD Kab. Belitung telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mencapai visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Capaian indikator sasaran strategis pertama, yaitu Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang terdapat 2 indikator kinerja yaitu (1) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan realisasi 1,23 % di atas target yang ditetapkan yaitu 2,70% sehingga capaian kinerja 219,51%, dan (2) Total Fertility Rate dengan realisasi 2,08% di atas target yang ditetapkan yaitu 2,22% sehingga capaian kinerja 106,73 %,
2. Capaian indikator sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana dengan 2 indikator kinerja yaitu (1) Meningkatnya Persentase PUS ber KB dengan realisasi 0,40 % di bawah target yang ditetapkan yaitu 0,50% sehingga capaian kinerjanya hanya 80% tapi masih dalam kategori baik, dan (2) Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP dengan realisasi 14,40% di atas target yang ditetapkan yaitu 12,67% sehingga capaian kinerja 113,65%,
3. Capaian indikator sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa indikator kinerja Jumlah Desa dengan IDM Desa Maju dengan realisasi 37 Desa (terdiri dari 28 Desa Maju dan 8 Desa Mandiri) jauh di atas target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 31 Desa dengan IDM Desa Maju di Kabupaten Belitung.
4. Capaian indikator sasaran strategis keempat yaitu Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Desa Maju dengan realisasi 27,58% jauh di atas target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 12% peningkatan Jumlah Desa Maju di Kabupaten Belitung, yang didalamnya terdapat peningkatan 9 desa dengan status IDM Desa Mandiri.
5. Capaian indikator sasaran penunjang urusan pemerintah daerah yaitu Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan realisasi tahun 2022 pada skala indeks 3,57 atau setara nilai konversi 89.30 berada di atas skala indeks yang ditarget sebesar 3,28.

Dari hasil pengukuran terhadap capaian PD DPPKBPMMD Kab. Belitung selama tahun 2022 menunjukkan peningkatan dan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2018-2023. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan kinerja PD DPPKBPMMD Kab. Belitung dapat dinyatakan **sangat baik**. Pencapaian kinerja PD DPPKBPMMD Kab. Belitung pada Tahun 2022 juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 11.004.683.700 (sebelas milyar empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan capaian realisasi kinerja keuangan Rp. 9.882.932.598 (sembilan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 89,81%.

Terhadap berbagai target capaian yang berhasil maupun yang tidak mencapai target capaian yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan di Tahun 2022 akan menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi PD DPPKBPMMD Kab. Belitung untuk melaksanakan

berbagai langkah kongkrit dalam perbaikan dan penanganan di masa yang akan datang.

4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai sasaran strategis terdapat beberapa hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi PD DPPKBPM Kab. Belitung dalam pemenuhan target kinerja tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan lintas sektor
- b. Belum optimalnya koordinasi antara DPPKBPM, Kecamatan dan Inpektorat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Sebagian pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan akhir PD DPPKBPM Kab. Belitung terutama dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa memerlukan pelibatan pihak luar. Seringkali hal tersebut menjadikan penghambat dalam proses penyelesaian output kegiatan yang berimplikasi pada tidak konsistennya waktu penyelesaian pekerjaan.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan pencapaian kinerja PD DPPKBPM Kab. Belitung sepanjang tahun 2022, dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya yaitu sebagai berikut :

- a. Mengintensifkan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan yang bersifat tematik, holistik, integratif dan spasial.
- b. Meningkatkan koordinasi dan pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah.
- d. Penyusunan perencanaan kegiatan dengan lebih cermat dalam upaya mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan pencapaian kinerja dengan memperhatikan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada serta berbagai faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan.
- e. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran kinerja kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat.
- f. Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat maupun berbagai perangkat daerah di Kab. Belitung untuk mensukseskan dan memaksimalkan penggunaan berbagai layanan yang disediakan oleh PD DPPKBPM Kab. Belitung.
- g. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.
- h. Harus adanya rencana aksi antar stakeholder dalam intervensi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Demikian LAKIP PD DPPKBPM Kab. Belitung Tahun 2022 yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN LAKIP 2022

1	PERJANJIAN KINERJA 2022
2	IKU DPPKBPPMD
3	RENCANA KERJA TAHUNAN 2022
4	PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
5	PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
6	REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2022
DPPKBPM Kabupaten Belitung**

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	1. - Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,70	1,23
		2. - Total Fertility Rate (TFR)	%	2,22	2,08
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	3. - Meningkatkan Persentase PUS (Pasangan Usia Subur) ber-KB	%	0,50	0,40
		4. - Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	%	12,67	14,40
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5. Jml desa dengan IDM Desa Maju	Desa	31	37 (28 Desa Maju dan 9 Desa Mandiri)
4	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6. Persentase Peningkatan Jumlah Desa Maju	%	12	27,58

Tanjungpandan, Januari 2023

Kepala DPPKBPM



SALMAN ALFARISI, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 197809151996121001

